MONOGRAF

Dinamika Politik

ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM

SOFA MARWAH
SOETJI LESTARI
OKTAFIANI CATUR PRATIWI

MUSLIMAT
نهضة العلماء
N
U

BUKU MONOGRAF

DINAMIKA POLITIK ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM

Penulis:
Sofa Marwah
Soetji Lestari
Oktafiani Catur Pratiwi

Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2020

Buku Monograf

DINAMIKA POLITIK ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM

© 2020 Universitas Jenderal Soedirman

Cetakan Kesatu, Agustus 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Penulis:
Sofa Marwah
Soetji Lestari
Oktafiani Catur Pratiwi

Editor Isi :
Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.

Editor Bahasa:
Dr. Siti Junawaroh, S.S., M.Hum.

Diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)
Telp. (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id

Anggota
Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
Nomor : 003.027.1.03.2018

ix + 67 hal., 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-7144-89-2

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, microfilm dan sebagainya.

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa, atas rahmat dan rida-Nya, buku monograf "Dinamika Politik Organisasi Perempuan Islam" bisa terselesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Buku ini merupakan bagian dari rangkaian proses penelitian yang berjudul *Model Hilirisasi Kelompok Perempuan Muslimat NU terhadap Pembangunan Gender di Daerah* yang didanai oleh Ristek Dikti. Penelitian ini berangkat dari persoalan isu-isu gender di daerah yang penanganannya tidak hanya membutuhkan sentuhan dari pemerintah, melainkan juga perlu kontribusi dari berbagai unsur masyarakat, termasuk dari kekuatan organisasi perempuan khususnya organisasi perempuan yang berbasis keagamaan yang memiliki massa cukup signifikan. Hal ini mengingat bahwa isu-isu gender di tingkat daerah membutuhkan komitmen aparat dan seperangkat aturan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kebijakan pembangunan suatu daerah sudah mengintegrasikan isu gender. Selain itu, implementasi kebijakan pembangunan berperspektif gender tetap membutuhkan dukungan semua unsur masyarakat.

Salah satu unsur masyarakat yang penting untuk dikaji dalam mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan berperspektif gender di daerah adalah kelompok perempuan Muslimat NU, sebagai salah satu organisasi perempuan berbasis keagamaan yang memiliki kekuatan sosial politik yang besar. Sebagai salah satu ormas perempuan yang terbesar, Muslimat NU banyak melahirkan kader muslimat yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Dalam waktu bersamaan dengan terpilihnya Khofifah (ketua Muslimat NU Pusat) sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Pilkada serentak tahun 2018, beberapa aktivis Muslimat NU lainnya yang terpilih Munjidah Wahab yang terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023 dalam Pilkada 2018. Munjidah Wahab adalah Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Jombang. Selain itu, Ika Puspita Sari, bendahara PC Muslimat NU Mojokerto juga terpilih sebagai Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Mojokerto 2018. Demikian pula Umi Azizah, yang terpilih sebagai Bupati Tegal dalam Pilkada 2018. Umi Azizah adalah ketua PC Muslimat Tegal. Pada periode sebelumnya, Umi Azizah adalah petahana wakil bupati yang naik menjadi Bupati Tegal karena bupati Tegal sebelumnya wafat pada

periode pertengahan kepemimpinanya. Adapun Ana Mu'awanah yang menjadi Sekretaris PC Muslimat Bojonegoro juga terpilih sebagai Bupati Bojonegoro dalam gelaran Pilkada Bojonegoro 2018. Mengingat keberadaan Muslimat NU adalah organisasi perempuan Islam yang bergerak dalam ranah sosial keagamaan dan tetap mengacu *Khittah* 1926 bukan sebagai organisasi politik, tampilnya aktivis Muslimat NU dalam kontestasi dan memenangkan perebutan kursi gubernur, bupati ataupun walikota adalah sesuatu yang menarik. Apalagi ditambah pada saat pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah tahun 2019 juga banyak kader muslimat yang terpilih, mereka tersebar di berbagai partai, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarkhi dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat mengakar dan mendalam sehingga mendukung posisi strategis Muslimat NU. Dukungan keanggotaan yang sangat banyak dan mendalam, menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU untuk mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender sekaligus menjadi *gender vocal point* di masyarakat.

Misi utama kami melalui buku ini adalah bagaimana organisasi perempuan (berbasis keagamaan) yang sering dipandang secara konvensional ini memiliki kekuatan potensial untuk ikut terlibat dalam mengatasi isu-isu gender baik di pusat maupun di daerah dengan cara mereka sendiri. Perlu cara tersendiri untuk melihat kekuatan politik mereka yang memungkinkan berbeda dengan kelompok/organisasi perempuan lainnya dalam menyuarakan aspirasi politiknya.

Dengan selesainya buku monograf ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku monograf ini dan berkontribusi memberikan informasinya, terutama kepada yang terhormat Ibu Laily Manshur (Ketua Muslimat NU Banyumas), Ibu Umi Azizah (Ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal sekaligus Bupati Kabupaten Tegal), Ibu Munjidah Wahab (Ketua Muslimat NU Kabupaten Jombang sekaligus Bupati Kabupaten Jombang). Beliau-beliau ini adalah perempuan-perempuan muslimat NU yang luar biasa dalam membesarkan organisasi. Rasa terima kasih yang dalam juga kami sampaikan kepada pihak DRPM Kemenristekdikti yang telah memberikan dukungan dana untuk penelitian ini, juga kepada pihak pimpinan LPPM Unsoed yang telah memfasilitasi jalannya penelitian ini. Terima kasih pula kepada Dr. Riris Ardhanariswari, SH., M.H yang bersedia mereview subtansi buku ini dan Dr. Siti Junawaroh, S.S. M. Hum.

yang telah mereview bahasa buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan semuanya.

Terlepas bahwa buku ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan di sana-sini, kami berharap buku ini bisa memberi manfaat, terutama untuk pemikiran tentang kajian gender dan gerakan-gerakan organisasi perempuan. Terima kasih

Purwokerto, Juli 2020

DAFTAR ISI

		Hal
Judul		i
Pengantar		iii
Daftar Isi		vii
Daftar Tabel		viii
Daftar Gambar		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Argumen Teoretis	5
	1.3 Metode Kajian	10
BAB II	**KEORGANISASIAN PEREMPUAN ISLAM**	11
	2.1 Perkembangan Organisasi Perempuan di Indonesia	11
	2.2 Muslimat NU sebagai Organisasi Perempuan Islam	17
BAB III	**MEMBACA POTENSI DAN KEKUATAN MUSLIMAT NU**	25
	3.1 Potensi Muslimat NU untuk Mendukung Pembangunan Gender	25
	3.2 Dinamika Muslimat NU dalam Relasinya dengan Negara	39
BAB IV	**PENGALAMAN KADER-KADER MUSLIMAT DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL**	47
	4.1 Kemenangan Mutlak Umi Azizah dalam Pilkada Kabupaten Tegal	47
	4.2 Dominasi Munjidah Wahab dalam Pertarungan Pilkada Kabupaten Jombang	51
	4.3 Keikutsertaan Laily Manshur dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Banyumas	55
BAB V	**PENUTUP**	61
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Muslimat NU pada Tingkat Pengurus Cabang 30

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.	Lambang Organisasi Muslimat NU	22
Gambar 2.	Kegiatan FGD dengan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas	27
Gambar 3.	Kegiatan FGD dengan Pengurus Cabang Muslimat NU Sokaraja	28
Gambar 4.	Wawancara dengan Ketua PC Muslimat Tegal/Bupati Tegal	48
Gambar 5.	Wawancara dengan Ketua PC Muslimat NU Jombang/Bupati Jombang	52
Gambar 6.	Wawancara dengan Ketua PC Muslimat NU Banyumas	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan mengenai dinamika politik organisasi perempuan tidak bisa dilepaskan dari keprihatinan mengenai rendahnya keterwakilan politik perempuan dalam legislatif nasional hingga daerah. Sejak hak-hak politik perempuan disuarakan dalam Kongres Umum Perempuan Indonesia III di Bandung Juli 1938, hingga hari ini keterwakilan politik perempuan belum proporsional dengan jumlah populasi kaum perempuan di Indonesia. [1] Kongres Umum tersebut secara tegas menyatakan tentang tuntutan hak perempuan untuk memilih. Tuntutan kaum perempuan tersebut dipenuhi setelah kemerdekaan tahun 1945, yaitu dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Kongres Umum perempuan tersebut telah berhasil menciptakan perubahan politik yang lahir dari sebuah gerakan sosial, yaitu berhasil mewujudkan pengakuan atas hak politik yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki. [2]

Sesungguhnya, awal kebangkitan pergerakan organisasi perempuan diawali dengan diselenggarakannya Kongres Umum Perempuan I di Yogyakarta. Pelaksanaan Kongres pertama tersebut, hingga hari ini diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia, yaitu pada 22 Desember 1928. Jika menengok pada masa yang lebih lampau, pergerakan organisasi perempuan dipengaruhi oleh upaya Kartini untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan pendidikan bagi kaum perempuan. Perjuangan yang dilakukan Kartini kemudian mengilhami tumbuhnya organisasi perempuan pada tahun 1912.[3] Sama halnya dengan pergerakan organisasi yang mengiringi kebangkitan nasional sejak Budi Utomo berdiri tahun 1908, organisasi perempuan yang berkembang ketika itu

---

[1] Mengenai tuntutan tentang hak-hak politik perempuan dalam kongres tersebut lihat Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, h. 141.

[2] Hooghe, Marc, *Gerakan Sosial, dalam Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*, Ishiyama, John dan Breuning, Marijke. Jakarta: Kencana, 2013, h. 374.

[3] Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: Grafiti, 1997.

lebih banyak berkiprah dalam bidang sosial ekonomi, belum menyentuh aspek politik. Studi Isnaeniyah mencatat bahwa organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika tahun 1912 yang diketuai oleh Theresia Sabarudin. [4]

Walaupun demikian, ketika sudah memasuki era setelah kemerdekaaan, kekuasaan Orde Baru yang begitu represif nyaris menenggelamkan pergerakan organisasi perempuan terutama terkait ranah politik. Meskipun pemerintah Orde Baru memiliki *political will* membentuk kementerian yang khusus menangani perempuan, tetapi kaum perempuan menjalankan peran sosial-politiknya hanya sebatas fungsi normatif. Secara eksplisit, pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan yang menempatkan peranan perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga.[5] Orde Baru mewujudkannya dengan menyatukan perempuan Indonesia dalam satu wadah utama yaitu Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Pada prinsipnya politik gender Orde Baru mendasarkan pandangannya bahwa perempuan Indonesia adalah kelompok homogen yang apolitis dan harus berperan sesuai kodratnya sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam urusan domestik.

Rendahnya keterwakilan politik perempuan selama era pemilu Orde Baru menjadi bukti represi Orde Baru terkait hak-hak politik perempuan. Pemerintah Orde Baru memiliki kepentingan agar kaum perempuan Indonesia memiliki kepatuhan terhadap kepentingan politik Orde Baru melalui Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. [6] Melalui ketiga organisasi tersebut praktik politik perempuan Orde Baru telah menempatkan perempuan sebagai istri yang mendukung karir suami dan menopang kekuasaan negara. Dengan demikian keterwakilan politik perempuan ketika itu sangat terbatas.

Meskipun perolehan kursi perempuan naik menjadi 7,8 persen pada Pemilu 1971 dari 5,9 persen pada Pemilu 1955, tetapi angka keterwakilan perempuan tersebut masih jauh dari harapan. Bahkan pada Pemilu 1977, keterwakilan perempuan turun menjadi 6,3 persen. Pada Pemilu 1982, perolehan kursi untuk perempuan naik menjadi 9,3 persen. Demikian pula pada Pemilu 1987, keterwakilan perempuan naik lagi menjadi 11,6 persen dan mencapai 12,6 persen pada Pemilu 1992. Tetapi pada pemilu terakhir pemerintahan Orde Baru, keterwakilan perempuan

---

[4] Erni Isnaeniyah, "Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* Vol 2 1 Maret 2017, h. 154-168.

[5] Pada tataran ini, tranformasi persoalan gender pada pembangunan Orde Baru mengadopsi konsep *Women in Development (WID).* Penjelasan mengenai WID lihat Shirin M Rai, *Gender and the Political Economy of Development*. Cambridge: Polity Press, 2002, h. 72.

[6] Ruth Indiah Rahayu, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan", dalam Lisa Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru.* Jakarta: LP3ES, 2004. h. 426

turun menjadi 10,8 persen (Pemilu 1997). [7] Adapun keberhasilan utama upaya keterwakilan politik perempuan pada Era Reformasi ditandai dengan ketentuan kuota 30 persen perempuan di parlemen, sejak ditetapkannya UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Kelahiran berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan organisasi perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya.

Upaya peningkatan keterwakilan secara normatif dimonopoli oleh partai politik yang melahirkan aktor-aktor politik yang maju dalam politik nasional hingga daerah. Walaupun demikian, dalam praktiknya, aktor-aktor politik tidak hanya diisi oleh partai politik. Dalam hal ini, terdapat banyak kelompok di masyarakat yang bergerak dan melahirkan aktor-aktor politik, seperti kelompok keagamaan, kelompok buruh, kelompok perempuan kelompok berbasis profesi dan sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, kelompok perempuan yang direpresentasikan oleh organisasi perempuan keagamaan, sesungguhnya dapat melahirkan banyak aktor politik perempuan yang juga handal.

Kajian ini dikhususkan untuk mengkaji keorganisasian perempuan Islam. Keberadaan organisasi perempuan Islam di Indonesia dimotori oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Aisyiah Muhammadiyah. Mengacu pada penjelasan Dawam Rahardjo, bahwa kedua organisasi tersebut merupakan *civil society* yang mengambil jarak dari kepentingan politik dan ekonomi.[8] Keduanya juga bertahan dari awal didirikan hingga hari ini dengan jumlah pendukung dan simpatisan yang sangat banyak, dari pusat sampai ke pelosok desa.

Studi ini mengkhususkan mengkaji Muslimat NU sebagai organisasi di bawah atau *underbow* Nahdaltul Ulama (NU). Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarki dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Pemahaman tentang *nahdliyin* merujuk pada sebutan bagi pengikut *ahlu sunnah wal jamaah* yang memiliki identitas kultural di bawah bimbingan kyai sebagai *jamaah* dan menjadi *jam'iyah* yang terorganisasi dalam Nahdlatul Ulama. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat kultural sebagai pengikut jamaah *nahdliyin* dalam kerangka besar organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai warga *nahdliyin*, mereka memiliki kepatuhan

[7] *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan* (Makalah Kebijakan). Jakarta: UNDP Indonesia, 2010, h. 3

[8] Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999, h. 159.

yang cukup tinggi kepada pemimpin mereka, baik kepada kiai, nyai ataupun yang mereka tempatkan sebagai guru atau ustaz/ustazah.

Kontribusi Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Muslimat NU adalah organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk memajukan kehidupan kaum perempuan dan keluarganya. Mereka banyak bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan, dan kesehatan. Muslimat NU juga mengelola berbagai lembaga pendidikan dan panti asuhan untuk yatim piatu ataupun lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bidang kesehatan, mereka juga mengelola klinik rumah bersalin ataupun rumah sakit. Mereka juga mengembangkan koperasi dan usaha keterampilan produktif lainnya yang dikelola secara mandiri oleh para anggotanya.

Melalui masing-masing kepengurusan di tingkat kabupaten, Muslimat NU mengelola Raudlatul Athfal (RA) atau TK maupun PAUD. Selain itu, Muslimat NU juga mengelola menangani panti asuhan untuk yatim piatu ataupun lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bidang kesehatan, Muslimat NU juga mengelola klinik rumah bersalin ataupun rumah sakit. Muslimat NU juga mengembangkan koperasi dengan nama Koperasi An-Nisa. Demikian pula untuk Aisyiah Muhammadiyah. Organisasi perempuan Islam di bawah payung organisasi Islam Muhammadiyah. Aisyiyah mengelola Akademisi Kesehatan, SMA/MA/SMK, SMP, SD/MI, TK maupun PAUD. Aisyiah juga mengelola SLB dan pendidikan non formal. [9] Seperti halnya dengan Muslimat NU, di bidang kesejahteraan Aisyiah juga mengelola koperasi dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dedikasi demikian menunjukkan kaum perempuan mampu mengisi ruang-ruang non-politik dan ekonomi yang tidak diisi oleh negara dan jauh dari kekuasaan.

Di sisi lain, alam reformasi telah bergerak mengembalikan naluri alamiah warga *nahdliyin* untuk ikut serta dalam perhelatan politik, dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjadi partai politik pilihan utama warga Nahdliyin ketika momentum politik membuka ruang yang luas bagi pembentukan partai. Ketika itu, NU tetap bersikukuh untuk menjalankan *Khittah* (garis perjuangan organisasi) 1926 sebagai organisasi di bidang sosial keagamaan, sehingga hasrat politik warga NU paling banyak disalurkan melalui PKB. Sejak mengikuti pemilihan umum (Pemilu) pertama era reformasi, yaitu tahun 1999, PKB menjadi salah satu partai politik yang bertahan di papan menengah hingga pemilu yang terakhir.

Sebagai bagian dari organisasi besar *underbow* NU, kiprah Muslimat NU tidak pelak dalam beberapa hal ikut terseret dalam arus

[9] https://*aisyiah.or.id* diakses 5 Agustus 2020.

politik yang terus bergulir. Dedikasi mereka yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi menunjukkan mereka adalah kaum perempuan yang mampu mengisi ruang-ruang nonpolitik dan ekonomi yang tidak diisi oleh negara dan jauh dari kekuasaan. Secara keorganisasian, Muslimat NU juga tetap merupakan organisasi perempuan *nahdliyin* yang bergerak di bidang sosial, ekonomi dan keagamaan. Walaupun demikian, persentuhan dengan dunia politik bukan hal yang mudah untuk dihindari. Dalam tradisi Gramscian, *civil society* meliputi semua institusi sosial dengan relasi nonekonomi, nonpemerintahan, tetapi memiliki situasi yang rumit, sehingga dapat saja muncul persentuhan dengan kekuatan hegemoni.[10] Oleh karena itu, kita bisa melihat adanya dinamika hubungan organisasi perempuan tersebut dengan perkembangan politik yang terjadi, terutama setelah era reformasi di negeri ini.

Ikatan sebagai sebuah organisasi besar dengan keanggotaan yang banyak tersebar dari perkotaan hingga perdesaan menjadikan banyak aktivis Muslimat bersinggungan dengan kegiatan politik. Antara lain hal itu tercermin dengan keikutsertaan para aktivis Muslimat NU dalam perhelatan besar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun pemilihan anggota legislatif pusat hingga kabupaten.

Untuk itu, studi ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika keikutsertaan Muslimat NU dalam perhelatan politik, khususnya di level politik lokal. Kajian dimulai dari perkembangan keorganisasian perempuan di Indonesia yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang keberadaan Muslimat NU, mulai dari kelahiran hingga mengupas tentang struktur keorganisasiannya. Selanjutnya, pembahasan mengetengahkan mengenai potensi Muslimat NU untuk mendukung keberhasilan pembangunan gender khususnya di tingkat daerah. Pembahasan berikutnya akan memfokuskan ke masalah bagaimana sesungguhnya Muslimat NU mengambil relasi dengan negara dan berpotensi untuk bergerak sebagai kekuatan politik. Studi ini dilengkapi dengan penelusuran terkait keikutsertaan beberapa aktivis Muslimat NU dalam peta politik di tingkat lokal, didukung analisis keberhasilan ataupun kegagalannya.

1.2 Argumen Teoretis

Gerakan sosial merupakan tantangan terhadap pembuat keputusan dalam upaya melakukan perubahan sosial tertentu. Gerakan sosial memang seringkali digerakkan oleh sebuah organisasi, tetapi

[10] Dalam Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia*. Stanford California: California University Press, 2004, h.9.

gerakan sosial sesungguhnya tidak identik dengan organisasi. [11] Sebagian perubahan politik disebabkan oleh gerakan sosial, walaupun gerakan sosial juga dapat terbentuk dari tujuan organisasi atau sasaran organisasi. Artinya, bagaimana sebuah organisasi melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, dapat saja mengarah pada gerakan sosial. Walaupun demikian, dalam penjelasan Marc Hooghe, gerakan sosial berupaya menciptakan perubahan politik yang diidentikkan dengan bentuk perlawanan politik. Dalam hal ini, Darmawan Triwibowo justru menekankan bahwa gerakan sosial merupakan sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, yang dilaksanakan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif. [12]

Adapun yang menjadi elemen-elemen gerakan sosial adalah aktivitas seperti unjuk rasa, pemogokan, lobi, publikasi dan sebagainya, dengan tujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam perkembangan studi gerakan sosial, sumber daya menjadi elemen penting dalam gerakan sosial, untuk menjaga keberlanjutan gerakan sosial, makna budaya gerakan sosial, serta situasi politik yang memfasilitasi terjadinya dan keberhasilan gerakan sosial. Dalam konteks ini, Hooghe menyatakan bahwa gerakan perempuan merupakan salah satu gerakan sosial baru yang banyak berkembang pada akhir abad ke-20 bersamaan dengan gerakan lingkungan, hak-hak sipil, dan sebagainya.

Lebih lanjut gerakan sosial dijelaskan sebagai bentuk aktivitas kolektif yang kurang terorganisasi, yang pada masa lebih lama bertujuan membawa atau mencegah perubahan sosial. Gerakan sosial berinteraksi dengan struktur politik sebuah masyarakat yang dilembagakan. Konteksnya, untuk memengaruhi dan terkadang berhasil mentransformasi struktur tersebut. [13] Adapun isu gender, pada umumnya menjadi menu dari gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru memperlihatkan ciri yang terlihat baru, antara lain dengan adanya bentuk baru praktik politik dan aksi kolektif. Selain masih dinaungi oleh organisasi konvensional, tetapi kelompok-kelompok di dalam gerakan sosial baru lebih cair dan partisipatif. Antara lain gerakan sosial baru ditunjukkan oleh gerakan feminisme, gerakan menentang perbudakan, gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan, dan sebagainya.

---

[11] Hooghe, Marc, *Gerakan Sosial, dalam Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*, Ishiyama, John dan Breuning, Marijke. Jakarta: Kencana, 2013, h. 374-375.

[12] Darmawan Triwibowo, "Menakar Signifikansi Aktivisme Civil Society", dalam Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES, 2006, h, 1.

[13] Gerad F Gaus dan Chandran Kukantas, "Gerakan-Gerakan Sosial Baru", dalam *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media dan LIPI, 2016, h. 606.

Dalam pemahaman Jurgen Habermas, gerakan sosial baru dipahami sebagai serangan dari *lifeworld* terhadap kekuatan penjajahan sistem. Artinya gerakan sosial baru menanggapi gangguan dan determinasi terhadap *lifeworld* dengan cara defensif dan ofensif. Walaupun demikian, bagi Jurgen Habermas, gerakan perempuan merupakan satu-satunya gerakan yang mengikuti tradisi gerakan pembebasan borjuis-sosialis. Dalam gerakan perempuan, mereka berjuang melawan penindasan patriarki, yang dilakukan dalam bentuk perjuangan ofensif.[14]

Jurgen Habermas menunjuk kehidupan sosial terdiri dari dua dimensi, yaitu sistem dan *lifeworld.* Sistem merupakan wilayah kehidupan yang diintegrasikan oleh objek tertentu, meliputi wilayah politik dan wilayah ekonomi. Wilayah politik didorong kekuasaan, sedangkan wilayah ekonomi didorong uang. Adapun *civil society* merupakan bagian dari *lifeworld*, yaitu wilayah kehidupan dengan tindakan sosial warganya didorong oleh nilai dasar yang muncul dalam kehidupan sosial seperti keadilan, kebenaran, kebaikan, dan sebagainya. Di wilayah *lifeworld* itulah menurut Habermas tercipta suatu ruang publik *(public sphere)* dengan para warga dapat mengekspresikan nilai-nilai tersebut secara bebas melalui institusi sosial yang terbentuk, yaitu *civil society*.[15] Dalam pandangan Jurgen Habermas, semua negara modern mempunyai wajah krisis legitimasi yang berakar dalam komodifikasi ruang publik. Untuk itu Jurgen Habermas menyarankan untuk mencegah publik dari pembentukan kebijakan negara yang akan memanipulasi ruang publik [16].

Tradisi Gramsci tentang *civil society* meliputi semua institusi sosial relasi nonproduksi, nonpemerintahan, nonkekeluargaan, melibatkan mulai dari kelompok bersantai sampai kelompok dagang, gereja dan partai politik. Dalam keterkaitan hubungan ekonomi, negara dan *civil society* yang rumit, yang saling tumpang tindih dan saling melengkapi, pada prinsipnya telah menumbuhkan bentuk-bentuk hegemoni sebagai hasil persentuhan kekuatan yang koersif, tetapi pada saat yang sama diterima sebagai konsesus.[17] *Civil society* atau disebut masyarakat sipil sesungguhnya merupakan komunitas secara umum. Dalam mengkaji masyarakat sipil, terdapat derajat keterkaitan antara individu dengan entitas, dan relasi mereka dalam jaringan sosial yang

[14] Ibid. h. 618.
[15] Stephen K White, *"Skeptics at The Celebration: Civil Society and Early Frankfurt School",* dalam Nancy L Rosenblum & Robert C Post, *Civil Society and Government*. Princeton: Princenton University Press, 2002, h. 146.
[16] Michael Edwards, *Civil Society*. Cambridge: Polity Press, 2004, h.60.
[17] Ibid.

terbentuk yang menimbulkan pengaruh luas dalam masyarakat.[18] Komunitas yang memiliki keterhubungan atau keterikatan yang tinggi didukung modal sosial yang besar, maka akan mudah melakukan tindakan kolektivitas. Hal tersebut karena kuatnya norma-norma yang dikembangkan oleh antarindividu dan dalam jaringan. Model sosial dalam pandangan Coleman memang abstrak *(least tangible).* [19] Modal sosial memfokuskan pada fungsi aspek-aspek tertentu dari struktur sosial, yaitu nilai dari aspek struktur sosial bagi aktor-aktor yang bermanfaat sebagai sumber daya untuk mencapai kepentingan mereka.

Arena utama sebagai modal sosial bekerja adalah jaringan hubungan warga (*networks of civic engagement*). Jaringan hubungan warga itulah yang kemudian disebut dengan jaringan sosial. Dalam konteks sekarang, jaringan sosial berupa asosiasi, yayasan, klub-klub olahraga, dan sebagainya. Dengan demikian, modal sosial merupakan blok bangunan yang tersusun dari kepercayaan dan resiprositas yang digunakan untuk menjalin dan memelihara hubungan sosial. Jaringan sosial berfungsi untuk memperluas hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya sejauh mana modal sosial terwujud dalam melalui jaringan sosial, maka akan membentuk masyarakat sipil *(civil society)* dari suatu sistem.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa gerakan sosial dan *civil society* sulit untuk dipisahkan. Terkait dengan itu, Iwan Gardono menyebutkan bahwa gerakan sosial sebagai *"civil society in action"*. Gerakan sosial lama atau *old social movement*, fokus pada isu yang berkaitan dengan materi dan umumnya terkait dengan satu kelompok. Adapun *new social movement* lebih banyak berhubungan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan. Walaupun dalam praktik, tidak mudah untuk memilah tipe setiap gerakan dan tidak berarti gerakan sosial lama selalu mendahului yang baru. [20]

Dalam pandangan Iwan Gardono, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan gerakan sosial yang erat dengan masalah ide, yang berarti termasuk dalam gerakan sosial baru, tetapi dalam hal waktu berdekatan dengan gerakan sosial lama. Iwan Gardono menegaskan bahwa gerakan sosial terkait dengan aksi organisasi atau kelompok *civil society* dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Selanjutnya gerakan sosial seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial atau *civil society*. Keberadaan NGO atau LSM merupakan *civil society* yang paling

[18] Ryan Zalman, Masyarakat Sipil, *dalam Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*, Ishiyama, John dan Breuning, Marijke. Jakarta: Kencana, 2013, h. 323-327.
[19] Ibid.
[20] Iwan Gardono, "Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat", dalam Darmawan Triwibowo, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society dalam Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES, 2006, h. xvi-xvii.

konsisten dengan perubahan sosial. Walaupun demikian LSM bukan merupakan satu-satunya kelompok *civil society*, karena termasuk dalam *civil society* juga yaitu organisasi massa, seperti organisasi massa keagamaan, organisasi komunitas, organisasi profesi, dan sebagainya.

Walaupun demikian, nilai patriarki menjadi penyebab sebab ”sulitnya” meletakkan kelompok perempuan sebagai kekuatan *civil society*. Subordinasi akibat patriarki terhadap perempuan menjadi penghalang bagi lahirnya kelompok perempuan sebagai kekuatan *civil society.* Patriarki telah tumbuh dan berkembang menjadi cara pandang utama untuk menjelaskan ketertinggalan perempuan di berbagai sudut dunia. [21] Nilai patriarki secara umum telah berlaku atau beroperasi pada hampir semua institusi sosial, ekonomi, hukum, politik maupun budaya. Carole Pateman menjelaskan tentang teori kontrak sosial klasik Abad ke-17 dan ke-18 mengandung adanya dimensi tekanan (patriarki). Ketika pendekatan kontrak sosial menawarkan hak-hak baru dan kebebasan bagi laki-laki, sebenarnya mereka sedang menghasilkan bentuk baru subordinasi patriarki bagi perempuan. Laki-laki mempunyai kebebasan dan menjadi kepala keluarga yang dapat mengambil peran dalam kontrak sosial. Kontrak yang asli oleh karenanya merupakan kontrak seksual yang mendukung hak laki-laki melebihi perempuan dan hak politik laki-laki untuk mengatur perempuan. Hak-hak maskulin melebihi perempuan yang terwujud dalam kontrak pernikahan, yang secara simultan mengasumsikan keberadaan perempuan yang memberi persetujuan bebas dan mengasumsikan subordinasi sosial mereka, karena perempuan menjadi bagian dari kehidupan politik melalui pernikahan. Kontrak dalam teori maupun praktek oleh karenanya mendukung subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Dalam perkembangan kontrak yang kontemporer, seperti dalam pernikahan, pekerjaan, perwakilan dan prostitusi, akan mendukung kebebasan laki-laki dan subordinasi terhadap perempuan. Dalam kontrak, individu akan menempatkan oposisi terhadap perempuan, dan semua simbolisasi tubuh perempuan. Karena argumen ini, Pateman beragumentasi bahwa kategori dalam praktek *civil society* tidak dapat secara sederhana menjadi universal bagi perempuan. Oleh karenanya, terdapat halangan yang mendasar bagi pengikutsertaan secara penuh dan setara bagi perempuan dalam politik demokrasi. Perempuan dilihat terutama hanya sebagai anggota keluarga, sebuah ruang yang dianggap terpisah dari *civil society* dan negara. Perempuan dan laki-laki yang

[21] Jane Pilcher dan Imelda Whelehan. *50 Key Concepts in Gender Studies*. London: Sage Publication, 2004.

bekerjasama sebagai warganegara adalah jarang dianggap signifikan untuk demokrasi.[22]

1.3 Metode Kajian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada penjelasan Strauss dan Corbin, yaitu mengenai keyakinan penulis berdasarkan pada pengalaman studi dan sifat dari permasalahan.[23] Penetapan informan dalam studi ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* bersifat sementara, mengoptimalkan keragaman, memungkinkan perubahan sesuai dengan informasi dan pemahaman di lapangan, dan jumlahnya sesuai prinsip kejenuhan informasi.[24] Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara *(interviewing)*, studi dokumen *(reading)*, dan observasi *(watching).* [25]

Untuk proses analisis data kualitatif, mengacu pada teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu studi ini menggunakan analisis interaktif yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[26] Dalam tahap reduksi data, penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, serta klarifikasi dari data-data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya pada tahap penyajian data, yaitu adanya sekumpulan informasi yang sudah tersusun, yang memberi kemungkinan pada penulis untuk melakukan penarikan kesimpulan. Adapun dalam tahap penarikan kesimpulan, penulis melakukan analisis dengan mencari, mencatat secara teratur terhadap pola atau konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan yang diambil adalah benar dan komprehensif.

---

[22] Barbara Sullivan, "Carole Pateman: Participatory Democracy and Feminism", dalam April Carter dan Geoffrey Stokes, *Liberal Democracy and Its Critics*, Cambridge: Polity Press, 1998. h. 182.

[23] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Procedur and Techniques*. Beverly Hills. SA: Sage Publications, 1990. h.19.

[24] Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007, h. 26.

[25] Keith Punch, *Developing Effective Research Proposal*. London: Sage Publication, 2006. h. 52.

[26] Matthew B Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: 2007, h. 9-10.

BAB II
KEORGANISASIAN PEREMPUAN ISLAM

2.1 Perkembangan Organisasi Perempuan di Indonesia

Studi gerakan perempuan paling banyak memusatkan perhatian pada perkembangan organisasi perempuan. Gerakan sosial memang sering digerakkan oleh organisasi, walaupun sesungguhnya gerakan sosial tidak identik dengan organisasi. [27] Studi tentang organisasi perempuan memiliki keunggulan mengkaji keterlibatan perempuan dalam organisasi dilihat sebagai puncak perwujudan kesadaran politik perempuan. Walaupun demikian, cara pandang demikian dapat membatasi pemahaman tentang pemikiran perempuan di ranah privat. [28] Dalam organisasi setidaknya perempuan melakukan perbincangan dan perdebatan untuk mendiskusikan banyak hal dengan leluasa. Oleh karena itu, meskipun memiliki kelemahan, tetapi studi tentang organisasi perempuan dapat melihat bagaimana inisiasi-inisiasi oleh kaum perempuan dan bagaimana kaum perempuan belajar dan berkembang dalam organisasi.

Jika menengok pada masa kolonial, pergerakan organisasi perempuan dipengaruhi oleh perjuangan Kartini ketika memperjuangkan hak-hak sosial dan pendidikan bagi kaum perempuan. Perjuangan yang dilakukan Kartini kemudian mengilhami tumbuhnya organisasi perempuan pada tahun 1912.[29] Saat itu Kartini menyerukan pendidikan bagi kaum perempuan, agar kaum ibu dapat menjadi cerdas untuk mendidik anak-anaknya. Selain Kartini, sesungguhnya masih banyak tokoh perjuangan perempuan pada masa lalu. Mereka juga pahlawan nasional, meski dalam setiap tahun tidak diperingati seperti halnya Kartini. Perjuangan mereka untuk memajukan kaum perempuan juga tidak kalah dengan kegigihan Kartini. Sebut saja Dewi Sartika, Rohana Kudus, Maria Walanda Maramis, Walidah Dahlan, dan sebagainya.

Seiring dengan era kebangkitan nasional yang ditandai oleh Budi Utomo berdiri tahun 1908, maka organisasi perempuan yang berkembang

---

[27] Marc Hooghe, "Gerakan Sosial", dalam John T Ishiyama dan Marijke Breuning (eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*. Jakarta: Kencana, 2013, h. 374.

[28] I Gusti Agung Ayu Ratih, "Jejak-jejak Perbincangan Perempuan dalam Sejarah", *Jurnal Perempuan* No. 63, h. 11-24.

[29] Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: Grafiti, 1997.

ketika itu juga lebih banyak mengusung isu sosial dan ekonomi. Ketika itu, isu politik belum menjadi fokus kerja dari organisasi perempuan. Studi Isnaeniyah mencatat bahwa organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika tahun 1912 yang diketuai oleh Theresia Sabarudin. [30] Poetri Mahardika memiliki tujuan untuk memberikan beasiswa pada anak perempuan bumiputra untuk melanjutkan sekolah. Rohana Kudus membentuk Pengradjin Amai Setia di Koto Gedang tahun 1914 dan menambahkan kegiatan pendidikan dalam kegiatan perkumpulan tersebut.

Dalam catatan Nia Sjarifudin, organisasi perempuan yang berdiri dan berkembang pada era sebelum kemerdekaan antara lain Pawiyatan Wanito yang berdiri di Magelang pada tahun 1915. Selain itu, terdapat Percintaan Ibu kepada Anak Temurun yang berdiri dengando pada tahun 1917. Di Tegal juga berdiri organisasi Purborini pada tahun 1917. Pada tahun 1917 juga berdiri Aisyiah Muhammadiyah di Yogyakarta. Adapun pada tahun 1918 di sebuah kota kecil Pemalang juga berdiri organisasi perempuan yang bernama Wanito Soesilo, Wanito Hadi di Jepara tahun 1918. Selanjutnya pada tahun 1919 berdiri Poetri Boedi di Surabaya, sedangkan di Yogyakarta berdiri Wanito Oetomo pada tahun 1920. Di Bukit Tinggi juga berdiri Serikat Kaoem Iboe Soematra pada tahun 1920, dan pada tahun 1924 di Yogyakarta juga berdiri Wanito Katolik. [31] Jika dilihat dalam konteks ini, berdirinya Muslimat NU yang menjadi fokus kajian ini, tampak agak belakangan berdiri, yaitu setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu berdiri tahun 1946.

Awal kebangkitan pergerakan organisasi perempuan diawali dengan Kongres Umum Perempuan I di Yogyakarta. Kongres pertama tersebut kelak diperingati sebagai Hari Ibu, yaitu pada 22 Desember 1928. Kongres dilaksanakan di Yogyakarta dan dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra. Pada kongres tersebut juga disepakati pembentukan Perikatan Perempoean Indonesia yang menggagas perbaikan nasib kaum perempuan. Upaya perbaikan dilakukan melalui lembaga pembiayaan untuk anak perempuan, pelatihan tentang lingkungan, serta larangan pernikahan di bawah umur. Pada Kongres Umum Perempuan II tahun 1935, digagas mengenai pentingnya memberi arti produktif bagi kerja-kerja rumah tangga. Meskipun gagasan tersebut gagal untuk memengaruhi kebijakan nasional tentang perburuhan, tetapi kongres telah menuntut agar pekerjaan di rumah juga dihargai sama dengan di luar rumah. Selanjutnya, hak-hak politik perempuan disuarakan dalam Kongres

[30] Erni Isnaeniyah, "Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* Vol 2 1 Maret 2017, h. 154-168.

[31] Nia Sjarifudin, "Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan", *Jurnal Perempuan* No. 63, 29-39.

Umum Perempuan Indonesia III di Bandung Juli 1938, dengan tuntutan agar perempuan memiliki hak untuk memilih. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, UUD 1945 pasal 27 menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mengenai tuntutan tentang hak-hak politik perempuan dalam kongres. [32]

Hingga menapak tahun 1938 perkembangan organisasi perempuan di atas, studi ini menemukan telah ada inisiasi pendirian Muslimat, dengan keikutsertaan perempuan muslimah dalam Muktamar NU ke-13 di Menes Banten pada tahun 1938. Ketika itu, muncul tokoh Muslimat yaitu Nyai Djuaesih.[33] Beliau dikenal pendakwah yang lugas dan penggerak emansipasi yang menginspirasi lahirnya Muslimat NU.[34] Tetapi tidak ada informasi lanjut yang menunjukkan hubungan kegiatan tersebut dengan Kongres Umum Perempuan tahun 1938. Dalam sejarah Muslimat tercatat, keberadaan Muslimat NU yang masih bernama Nahdlatul Oelama Muslimat (NOM) pada tahun 1940 mengikuti muktamar NU di Surabaya. Ketika itu, Pengurus Besar NU menunjuk Nyai R Hindun sebagai ketua. Selanjutnya tidak ada informasi apakah ketika itu NOM sudah terlibat atau hadir misalnya pada Kongres Perempuan Indonesia. [35]

Pada era berikutnya, perkembangan organisasi perempuan tidak lepas dari pendudukan Jepang. Keorganisasian perempuan pada masa pendudukan Jepang kurang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang. Studi dari Cora Vreede-De Stuers, [36] menunjukkan bahwa satu-satunya organisasi perempuan yang diizinkan oleh kolonial Jepang adalah Fujinkai (Perkumpulan Perempuan), bertujuan untuk program baca tulis, menyediakan makanan untuk umum, serta pekerjaan sosial lainnya. Adapun pada perang merebut kemerdekaan, organisasi perempuan yang terbentuk adalah Perwani atau Persatuan Wanita Negara Indonesia. Dalam hal ini Perwani mengorganisasi tim medis, menjalankan dapur umum, serta klinik. Ketika Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945, Perwani berinisiatif untuk melakukan kongres di Klaten dengan hasil peleburan Perwani dengan organisasi perempuan yang ada ketika itu dan menjadi Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia).

---

[32] Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, h. 141.

[33] Penyebutan nama-nama tokoh Muslimat NU menggunakan "nyai" mengacu pada semua referensi yang digunakan, yang semuanya menggunakan identitas nyai tersebut. Nyai di kalangan masyarakat *nahdliyin* bermakna guru/ustadzah yang memiliki atau mengajar di pondok pesantren.

[34] http://muslimatnu.or.id/tokoh/nyai-djuaesih-tokoh-muslimat-nu-jawa-barat/ diakses tanggal 3 April 2020.

[35] http://muslimatnu.or.id/tokoh/nyai-hindun-peletak-dasar-dasar-muslimat/ diakses tanggal 3 April 2020.

[36] Ibid, h. 175-193.

Selanjutnya pada tahun 1946, melalui kongres di Solo dibentuklah Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang anggotanya terdiri dari Perwari, PPII, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, perempuan Partai Khatolik Indonesia. Selanjutnya Kowani menyelenggarakan kongres tahun 1946 di Madiun yang dihadiri 13 perwakilan perkumpulan perempuan dan menyuarakan dukungan kepada republik mempertahan-kan kemerdekaan dari kolonial Belanda. Kongres-kongres berikutnya diselenggarakan di tengah ketidakpastian politik Indonesia ketika masa perjanjian Linggarjati dan kemudian perjanjian Renville.

Pada Kongres tahun 1948, Kowani mendeklarasikan aktivitas mereka dengan mendasarkan pada lima sila Pancasila, dengan prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan (persatuan), kerakyatan dan keadilan sosial. Di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi akibat pemisahan Republik Indonesia menjelang penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Kowani menyelenggarakan konferensi Permusjawaratan Wanita Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh 82 organisasi perempuan dari Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Pada tahun 1950, Kowani melalui kongres di Jakarta diganti dengan Kongres Wanita Indonesia. Dalam pandangan Cora Vreede-De Stuers, Kongres Wanita Indonesia ini tidak lagi memiliki kekuatan mandiri dan langkah yang tegas, seperti perjuangan mereka yang terdahulu.[37] Walaupun Kongres Wanita Indonesia tetap memiliki tujuan kemerdekaan Indonesia secara absolut, realisasi hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga negara, serta komitmen pada keamanan dan perdamaian internasional. Kongres selanjutnya dilaksanakan di Bandung pada tahun 1952 yang menghasil-kan berbagai program hukum, pendidikan, dan sosial ekonomi. Mereka mengirimkan delegasi ke Konferensi Perempuan Pan-Pasifik di Selandia Baru dan seminar Unesco di New Delhi. Yayasan yang dibentuk oleh Kongres Wanita Indonesia, yaitu yayasan untuk anak-anak, yayasan untuk keuangan dan beasiswa untuk anak perempuan, dan yayasan Hari Ibu.

Pada tahun 1955, kongres dilaksanakan di luar Jawa yaitu di Palembang. Dalam kongres tersebut, terdapat pengelompokkan peserta kongres dari organisasi politik dan nonpolitik. Kelompok organisasi politik yaitu Muslimat (Partai Masjumi), Wanita Demokrat (Partai Nasionalis Indonesia/PNI), Wanita Indonesia (Persatuan Indonesia Raja/PIR), serta Partai Wanita Rakjat yang dipimpin oleh Mangunsarkono. Partai Wanita Rakjat juga mengikuti Pemilu 1955 meskipun tidak ada anggotanya yang terpilih. Kelompok nonpolitik yaitu Ikatan Bidan Indonesia, Bhajangkari, Persatuan Istri Tentara, Perwari, dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).

[37] Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Perkembangan organisasi perempuan di atas mencatat adanya keterlibatan Muslimat dalam Kongres Wanita Indonesia di Palembang, terutama Muslimat dari Partai Masyumi (Masyumi Muslimat).[38] Sayangnya tidak ada informasi keterlibatan apakah Muslimat NU terlibat dalam kongres tersebut. Hal yang tercatat adalah pada tahun tersebut adalah Muslimat NU sudah berdiri dan diketuai oleh Mahmudah Mawardi yang secara aktif menggalang suara dan berkampanye untuk Partai NU menjelang Pemilu 1955. Walaupun demikian tidak ada informasi yang jelas apakah Muslimat NU terlibat dalam Kongres Wanita Indonesia yang dilaksanakan di Palembang tahun 1955.

Pada tahun 1957, Kongres Wanita Indonesia melaksanakan kongres di Surabaya. Kongres dilaksanakan di tengah menguatnya kepemimpinan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin. Selain itu, terjadi masalah dalam negeri seperti perebutan Irian Barat. Kongres memutuskan untuk mendukung sepenuhnya perjuangan merebut kembali Irian Barat. Kongres juga memutuskan untuk mengirim perwakilan ke Konferensi Perempuan Asia-Afrika di Kolombo 1958.

Pada era berikutnya, Gerwani berkembang menjadi organisasi perempuan yang dikenal radikal. Keberadaan Gerwani menorehkan sejarah tersendiri pada masa kelam di republik ini, karena tuduhan yang dilekatkan karena dianggap terlibat dalam peristiwa G 30 September 1965. Gerwani melakukan perlawanan terhadap proses domestikasi dan menuntut agar perempuan menjadi pelaku politik. Gerwani dikenal sebagai gerakan perempuan yang sangat militan menuntut persamaan hak perempuan sebagai pelaku sosial dan politik secara keras. Walaupun demikian, dalam hal hubungan perkawinan maka Gerwani seperti organisasi perempuan lainnya. Kedekatan Gerwani dengan dengan pusat kekuasaan di tengah menguatnya Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, menjadikan Gerwani berseberangan dengan organisasi perempuan lainnya. Ketika peristiwa G 30 September 1965 meledak dengan kesimpangsiuran informasi yang berkembang, organisasi perempuan keagamaan menggantikan Gerwani yang telah dibubarkan dan mereka sangat aktif menentang kelompok kiri. [39]

Pada masa kekuasaan Orde Baru, organisasi perempuan berada dalam kontrol rezim yang sangat ketat. Politik gender rezim Orde Baru mendasarkan pandangannya bahwa perempuan Indonesia adalah kelompok homogen yang apolitis dan harus berperan sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam urusan domestik, dan hal itu dilekatkan sebagai

[38] Studi mengenai Masyumi Muslimat antara lain oleh Diana Trisnawati, *Kiprah Masyumi Muslimat dalam Pergerakan Wanita Indonesia Periode 1945-1960*, Skripsi Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga, 2019.

[39] Saskia E Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta : Galangpress, 2010.

kodrat kaum perempuan. Politik gender Orde Baru dimanifestasikan dalam beberapa dokumen Negara ketika itu yaitu GBHN, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Panca Dharma Wanita. Untuk mendukung politik gender ini pemerintah Orba juga menempatkan bahwa apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yang diidentikkan dengan tuduhan terhadap tindakan Gerwani yang "amoral" ketika terjadi pembunuhan terhadap Pahlawan Revolusi, adalah tidak pantas untuk perempuan, maka yang baik bagi perempuan Indonesia adalah sesuai dengan kodrat perempuan, yaitu di ruang domestik dan mendampingi suami. Kekuasaan Orde Baru berhasil menempatkan perempuan Indonesia untuk berperan sebagai ibu dan istri. Peranan perempuan di dunia publik tidak "mengeluarkan" mereka dari ruangnya, karena sebatas menjadi pendamping suami dan menopang kekuasaan negara. Keberadaan perempuan dalam masyarakat tetap berkaitan dengan peranannya sebagai ibu dan peran perempuan dalam politik adalah sesuatu hal yang tidak semestinya.

Negara mewujudkannya dengan menyatukan perempuan Indonesia dalam satu wadah organisasi perempuan, Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi. Pemerintah Orde Baru memiliki kepentingan agar kaum perempuan Indonesia memiliki kepatuhan terhadap kepentingan politik Orde Baru melalui Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan juga PKK.[40] Ketiga organisasi tersebut mengembangkan wawasan kaum perempuan anggotanya untuk membantu suami sebagai aparat negara, dengan kata lain mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru. Melalui ketiga organisasi tersebut praktik politik perempuan Orde Baru telah menempatkan perempuan sebagai istri yang mendukung karir suami dan menopang kekuasaan negara.

Sungguhpun demikian, pada masa Orde Baru juga telah mulai berkembang organisasi perempuan yang lebih progesif. Hal penting sebagai momentum hal tersebut adalah ratifikasi CEDAW (*The Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut dan meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Upaya meratifikasi CEDAW merupakan komitmen negara dalam jangka panjang untuk melindungi hak-hak asasi perempuan dan mengupayakan pencegahan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia.

Dalam konteks demikian, organisasi perempuan yang mulai berkembang pada masa Orde Baru antara lain Solidaritas Perempuan dan

[40] Ruth Indiah Rahayu, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan", dalam Lisa Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru.* Jakarta: LP3ES, 2004. h. 426

Kalyanamitra. [41] Kedua organisasi tersebut melakukan beragam kegiatan pendidikan untuk kaum perempuan demi mengkritisi kebijakan pemerintah. Mereka juga mengikuti gerakan perempuan pada tingkat internasional seperti di Filipina, Thailand serta mengikuti Konferensi Perempuan Dunia di Beijing tahun 1995. Kebangkitan perempuan Indonesia pada masa Orde Baru disebut dalam studi Nia Sjarifudin yaitu berdirinya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Pada tahun-tahun tersebut, organisasi Muslimat NU dipimpin oleh Nyai Aisyah Hamid Baidlowi. Aisyah menjabat sebagai sebagai Ketua Umum Muslimat NU untuk periode 1995-2000. Pada masa kepemimpinan Nyai Aisyah Hamid Baidlowi, Muslimat NU bergerak menjadi organisasi perempuan yang mandiri, maju, dan modern. Tercatat Nyai Aisyah Hamid Baidlowi ditunjuk menjadi Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), tetapi tidak ada informasi kepemimpinan tersebut dari sampai tahun berapa. [42] Adapun menjelang reformasi 1998, tercatat berdirinya Komisi Nasional Perlindungan Perempuan atau yang dikenal sebagai Komnas Perempuan. Selain itu, muncul pula kelompok perempuan dengan nama Suara Ibu Peduli.

Pada era berikutnya, keberhasilan perjuangan organisasi perempuan ditandai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan (1999-2001). Perlu disampaikan bahwa Khofifah Indar Parawansa adalah ketua Muslimat NU sejak tahun 2000 hingga sekarang. Selanjutnya kelompok perempuan membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Pada fase-fase berikutnya perjuangan kelompok perempuan di Indonesia mendorong kebijakan afirmasi kuota 30 persen perempuan. Perjuangan tersebut juga didukung oleh Kaukus Perempuan Parlemen, sehingga terjadi sinergi yang kuat. Demikian perjuangan mencapai hasil yang luar biasa dengan masuknya kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif, melalui penyelenggaraan pemilu sejak tahun 2004 hingga sekarang.

2.2. Muslimat NU sebagai Organisasi Perempuan Islam

Muslimat NU merupakan salah satu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yaitu sebagai badan otonom. Muslimat NU beranggotakan perempuan muslimah yang memiliki paham *ahlusunnah*

[41] Nia Sjarifudin, "Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan", *Jurnal Perempuan* No. 63, 29-39.

[42] http://muslimatnu.or.id/tokoh/aisyah-hamid-baidlowi-muslimat-nu-dan-pemberdayaan-ekonomi-perempuan/ diakses tanggal 3 April 2020.

wal jamaah. Dalam hal ini, keberadaan Muslimat NU mengikuti perjuangan NU yang memegang paham *ahlusunnah wal jamaah* dan mengikuti salah satu mahdzab dari empat mahdzab. Keanggotaan Muslimat NU adalah perempuan warga negara Indonesia yang beragama Islam, paling rendah berusia 20 tahun ke atas atau sudah menikah.

Tumbuhnya ide gagasan untuk mendirikan Muslimat NU sebagai organisasi perempuan muslimah Nahdlatul Ulama berlangsung di tengah perkembangan pergerakan di Indonesia. Dalam hal ini, proses pendirian Muslimat NU tidak serta merta langsung selesai pada satu kali muktamar. Tetapi diperlukan waktu pembahasan yang lama dari penyelenggaraan satu muktamar ke muktamar berikutnya. Pada tahun 1926, ketika Muktamar NU diselenggarakan di Surabaya, perempuan-perempuan muslimah mulai merintis berdirinya Muslimat, di tengah-tengah kegiatan muktamar.

Selanjutnya pada penyelenggaraan Muktamar NU di Menes Pandeglang tahun 1938, inisiasi perempuan *nahdliyin* untuk mendirikan organisasi perempuan disepakati oleh para ulama NU. Ketika itu, keberadaan organisasi perempuan yang disebut Muslimat NU disepakati sebagai anggota organisasi NU, bukan sebagai pengurus. Pada kesempatan tersebut, tokoh-tokoh perempuan muslimah antara lain Nyai Djuaesih dan Siti Sarah. Ketika Muktamar NU ke-14 tahun 1939 dilaksanakan di Magelang, beberapa wakil dari kelompok dari berbagai daerah seperti Muntilan, Sokaraja, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Purworejo ikut menghadiri muktamar tersebut dan melakukan rapat persiapan pendirian organisasi Muslimat NU. Dalam hal ini, masing-masing perwakilan menyampaikan pandangannya terkait pentingnya mengenai kontribusi kaum perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa perwakilan perempuan muslimah memimpin sidang yang dilaksanakan pada muktamar tersebut. Mereka mendiskusikan tentang pentingnya peranan perempuan dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan dan dakwah. Persidangan Muslimat tersebut dipimpin oleh Nyai Djuaesih dari Bandung.[43]

Persiapan pendirian Muslimat semakin matang pada saat pelaksanaan Muktamar NU ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Dalam muktamar tersebut, juga dilaksanakan rapat-rapat oleh ibu-ibu muslimah yang beberapa pandangan umum seperti; 1) persetujuan keberadaan muslimat oleh muktamar; 2) anggaran dasar muslimat; 3) susunan kepengurusan; 4) kurikulum untuk pendidikan madrasah putri; 5) rencana penerbitan majalah bulanan. Resolusi tesebut kemudian disampaikan langsung dalam kongres dan disetujui oleh *Hoof Comitee Congress* NU

[43] *Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU*, 30 Maret 2015, dalam http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu diakses tanggal 1 Juni 2019

ketika itu. Ketika itu, nama Muslimat NU masih dikenal dengan Nahdlatul Oelama Muslimat (NOM). Tercatat Nyai R Hindun merupakan tokoh penting dalam sejarah Muslimat NU generasi awal, bahkan saat organisasi Muslimat NU masih prematur. Ia memberikan fondasi-fondasi bagi berdirinya Muslimat NU pada 29 Maret 1946. Selain itu juga tidak ada informasi lanjut terkait dengan kiprah Nyai Hindun ini, bahkan bukan dirinya yang tercatat sebagai ketua Muslimat NU yang pertama .[44]

Selama penjajahan Jepang berlangsung, kegiatan keorganisasian NU maupun aktivitas perempuan muslimah nyaris lumpuh. Setahun proklamasi kemerdekaan RI, kegiatan organisasi NU dan perempuan muslimah mulai menggeliat lagi. Pada saat Muktamar NU tahun 1946 diselenggarakan di Purwokerto, Muslimat menjadi bagian resmi NU yang memiliki struktur kepengurusan sendiri. Tanggal 29 Maret 1946 atau 26 Rabiul Akhir 1465 tercatat sebagai hari kelahiran resmi Muslimat NU. Sebagai bagian resmi dari NU, Muslimat menangani berbagai masalah perempuan dalam kemasyarakatan. [45] Ketika itu ketua pengurus Muslimat adalah Nyai Chadijah Dahlan. Kepengurusan resmi Muslimat NU pada saat pendirian resmi di Purwokerto adalah sebagai berikut: [46]

Penasehat	:	Nyai Fatmah - Surabaya
Ketua	:	Nyai Chadijah - Pasuruan
Penulis	:	Nyai Mudrikah
Penulis II	:	Nyai Muhajja
Bendahara	:	Nyai Kasminten - Pasuruan
Pembantu	:	Nyai Fatehah
Pembantu	:	Nyai Musyarrafah - Surabaya
Pembantu	:	Nyai Alfijah

Pada saat Muktamar NU ke-17 di Madiun tahun 1948, dibentuk beberapa komisariat kepengurusan Muslimat di berbagai daerah. Komisariat yang terbentuk adalah Madiun, Surabaya, Banyumas (Sokaraja), Kedu, Cirebon, Priangan (Tasikmalaya), Jember (Besuki), Malang, dan Tapanuli. Dalam hal ini Komisariat Banyumas diketuai oleh Nyai Sulimah dari Sokaraja. Pada era setelah itu, kegiatan Muslimat lebih banyak berhubungan dengan suasana perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam hal ini para perempuan ikut

[44] http://muslimatnu.or.id/tokoh/nyai-hindun-peletak-dasar-dasar-muslimat/ diakses tanggal 3 April 2020.

[45] PP Muslimat NU, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta: PP Muslimat NU, 1979, h. 46.

[46] *Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU*, 30 Maret 2015, dalam http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu diakses tanggal 1 Juni 2019.

berjuang baik secara langsung, seperti turut bergabung menjadi kesatuan pejuang melalui pasukan Hizbullah, Sabilillah, barisan Mujahidin dan sebagainya, atau secara tidak langsung seperti melayani dalam dapur umum, kesehatan, penyediaan pakaian, dan sebagainya. Baru setelah tahun 1954, Muslimat melaksanakan kongres secara otonom pada saat Muktamar NU ke-20 di Surabaya. Adapun Ketua Umum PP Muslimat NU dari masa ke masa yaitu sebagai berikut: [47]

1	Nyai Chodijah Dahlan	1946-1947
2	Nyai Yasin	1947-1950
3	Nyai Mahmudah Mawardi	1950-1979
4	Hj. Asmah Syahruni	1979-1995
5	Hj. Aisyah Hamid Baidlawi	1995-2000
6	Hj. Khofifah Indar Parawansa	2000- sekarang

Pada era Orde Lama, Muslimat NU dipimpin oleh Nyai Mahmudah Mawardi. Secara politik, peran Nyai Mahmudah tampak menonjol karena aktif melakukan penggalangan suara dan berkampanye untuk Partai NU menjelang Pemilu 1955. Seperti diketahui bahwa pada tahun 1952, NU keluar dari Partai Masyumi dan mendirikan Partai NU. Nyai Mahmudah Mawardi merupakan salah satu tokoh Muslimat NU yang paling terkenal berkat kepiawaiannya membawa organisasi perempuan NU tersebut ke arah yang lebih progresif. Kepemimpinan beliau dalam Muslimat NU berlangsung dari tahun 1950-1979. Di samping itu, Nyai Mahmudah juga secara aktif melaksanakan penyuluhan tentang pemilu, bakti sosial membantu keluarga miskin, serta aktif menyuarakan masalah perempuan terkait perkawinan, hak-hak berumah tangga dan bermasyarakat dalam media massa. [48]

Penerus Nyai Mahmudah sebagai ketua Muslimat NU adalah Nyai Asmah Syahruni. Beliau dikenal sebagai perempuan yang mampu berjuang menembus batas. Ia memang tidak berasal dari keluarga darah biru pada pendiri NU, tetapi mampu menjadi ketua Muslimat NU hingga tiga periode. Nyai Asmah Syahruni menjadi ketua Muslimat NU tiga periode dari tahun 1979 hingga 1995. Ia juga menjadi anggota DPR RI setelah beberapa kali menemui batu sandungan. Nyai Asmah mampu tampil progresif memperjuangkan hak-hak perempuan. Nyai Asmah mampu mendorong perempuan NU untuk mampu berdikari. Ia menciptakan banyak programyang dirasakan manfaatnya hingga

[47] *Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU*, 30 Maret 2015, dalam http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu diakses tanggal 1 Juni 2019

[48] http://muslimatnu.or.id/tokoh/mahmudah-mawardi-dan-sepak-terjang-politikus-perempuan-di-pemilu-1955/ diakses tanggal 3 April 2020.

sekarang, seperti lembaga pendidikan, klinik kesehatan, koperasi hingga balai latihan kerja.[49]

Pada masa peralihan antara Orde Baru dan Reformasi, Muslimat NU dipimpin oleh Nyai Aisyah Hamid Baidlawi. Nyai Aisyah Hamid Baidlowi menjadi ketua Muslimat NU untuk periode 1995-2000. Nyai Aisyah secara aktif mendorong perempuan anggota Muslimat NU tidak menjadi konsumen saja tetapi juga harus produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Program Nyai Aisyah berhasil mendirikan 107 koperasi primer yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, serta tiga Pusat Koperasi dan Induk Koperasi Annisa (Inkopan). Aisyah juga merealisasikan berdirinya Pusdiklat Muslimat NU di Pondok Cabe, yang sebelumnya digagas oleh pendahulunya, Nyai Asmah Sjachruni. Nyai Aisyah Hamid tercatat pernah menjadi anggota DPR RI untuk tiga periode pemilu yaitu sejak 1997 hingga 2009. Ia juga pernah menerima berbagai penghargaan nasional maupun internasional seperti *Honorary Award of the Realization of World Peace and the Promotion of Education and Culture* dari Soka University Tokyo pada tahun 2001. [50]

Ketua Muslimat NU sejak tahun 2000 adalah Hj. Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Hj. Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Hj. Khofifah pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Menteri Sosial pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2018). Hj. Khofifah berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM, atas komitmennya keliling nusantara untuk mengajak perempuan anggota Muslimat NU membangun koperasi. Penghargaan selanjutnya diperoleh Hj. Khofifah pada tahun 2011, yaitu dipilih menjadi tokoh penggerak masyarakat oleh *Islamic Fair of Indonesia*. Adapun penghargaan tingkat internasional yang diterimanya mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Hj. Khofifah disebut memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Keberhasilan Hj. Khofifah merupakan contoh kesuksesan sebuah negara Muslim terbesar di dunia dalam memecahkan *gender stereotyp*e dan agama.[51] Sebagai ketua Muslimat NU nasional sejak 2000, Hj. Khofifah Indar Parawansa menjadi Gubernur Jawa Timur untuk periode 2018-2023.

[49] http://muslimatnu.or.id/tokoh/asmah-syahruni-dari-rantau-muslimat-nu-penembus-batas/ diakses 3 April 2020

[50] http://muslimatnu.or.id/tokoh/aisyah-hamid-baidlowi-muslimat-nu-dan-pemberdayaan-ekonomi-perempuan/ diakses tanggal 3 April 2020.

[51] http://republika.co.id 12 Agustus 2017 diakses 4 April 2020

Visi-Misi, Struktur Organisasi dan Program Kerja Muslimat NU

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki visi misi Muslimat NU dijalankan secara nasional dari atas sampai ke bawah. Visi dan misi Muslimat NU adalah sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridai Allah Swt.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah Swt.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tujuan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridai Allah Swt.

   Berikut lambang organisasi Muslimat NU.

Gambar 1. Lambang Organisasi Muslimat NU

Berikut makna lambang Muslimat.

1. Bola dunia terletak di tengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdi dan beramal guna mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

2. Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan takwa kepada Allah Swt.
3. Lima buah bintang terletak di atas, yang terbesar di puncak berarti: Sunnah Rasulullah Saw yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah'anhum.
4. Arti seluruh bintang yang berjumlah sembilan buah yaitu: Wali sanga atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali sanga, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

Adapun warna-warna yang digunakan dalam lambang Muslimat NU di atas, memiliki makna sebagai berikut: 1) putih melambangkan ketulusan dan keihlasan; 2) hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian; 3) tulisan Nahdlatul Ulama berarti Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

Selanjutnya dijelaskan mengenai perangkat organisasi Muslimat NU, yaitu terdiri dari lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Lembaga yang berbadan hukum, yaitu: 1) Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKMNU); 2) Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Bina Bakti Wanita; 3) Yayasan Haji Muslimat NU (YHMNU); 4) Induk Koperasi An-Nisa' (INKOPAN). Adapun lembaga yang tidak berbadan hukum terdiri dari: 1) Himpunan Da'iyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU (Hidmat NU); 2) Ikatan Haji Muslimat NU (IHMNU); 3) Ikatan Guru TK Muslimat NU (IGTKMNU); 4) Ikatan Guru RA Muslimat NU (IGRAMNU); 5) Ikatan Pengelola TK Muslimat NU (IPTKMNU); 6) Ikatan Pengelola RA Muslimat NU (IPRAMNU); 7) Ikatan Guru Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU; 8) Ikatan Pengelola Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU.

Organisasi Muslimat NU memiliki jenjang kepemimpinan organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat anak ranting. Jenjang kepemimpinan organisasi digambarkan sebagai berikut.

- Pimpinan Pusat (PP) untuk Tingkat Pusat.
- Pimpinan Wilayah (PW) untuk Tingkat Provinsi.
- Pimpinan Koordinator Daerah (P-Korda) untuk Tingkat eks Karesidenan.
- Pimpinan Cabang (PC) untuk Tingkat Kabupaten/Kota.
- Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) untuk Cabang di Luar Negeri.
- Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk Tingkat Kecamatan.
- Pimpinan Ranting (PR) untuk Tingkat Kelurahan/Desa.
- Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk Tingkat Dusun/RW.

BAB III
MEMBACA POTENSI DAN KEKUATAN MUSLIMAT NU

3.1 Potensi Muslimat NU untuk Mendukung Pembangunan Gender

Pada hakikatnya pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat (laki-laki dan perempuan) adil dan sejahtera. Tetapi pada kenyataannya, pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula dianggap "netral" dan akan memberi efek manfaat yang sama kepada semua warga, ternyata memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi utama untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mendorong perempuan sebagaimana halnya laki-laki dalam hal perhatian dan pengalaman, pada dimensi yang terintegrasi mulai dari desain, implementasi, sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pada semua aspek politik, ekonomi, dan sosial, agar kesetaraan dan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dapat dicapai. [52]

Pengarusutamaan gender mulai diterapkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Beberapa prinsip penting dalam pengarusutamaan gender menurut pengertian definisi dari PBB, ILO, UNDP, yaitu : 1) pengarusutamaan gender untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender; 2) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan lintas sektoral dan di semua tingkatan, baik nasional maupun daerah; 3) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam agenda pembangunan; 4) mengadopsi perspektif gender ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan; 5) mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka perencanaan pembangunan menjadi sensitif gender; 6) selalu memperhitungkan dampak dari peran gender dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses dan manfaat

[52] Shirin M Rai, *Gender and the Political Economy of Development*. Cambridge: Polity Press, 2002, h.173.

pembangunan, khususnya dampak negatif terhadap perempuan; 7) menciptakan suasana kondusif agar *gender mainstreaming* lebih mudah diterima.

Sejauh ini capaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan selama sembilan tahun terakhir. Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kapabilitas perempuan dibanding laki-laki, yang ditunjukkan dengan capaian GDI *(Gender Development Index)* atau IPG (Indeks Pembangunan Gender). GDI/IPG merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2017, IPG Indonesia yaitu 93,33, di bawah rata-rata IPG dunia 94,12. Dengan nilai IPG di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Selain itu, dalam pembangunan gender di Indonesia juga masih menunjukkan disparitas pada nilai IPG nasional dan IPG tingkat daerah. Meskipun pada tahun 2018 IPG Indonesia meningkat menjadi 90,99, namun terdapat 19 provinsi yang capaian IPG-nya di bawah rata-rata nasional, yaitu Provinsi Papua dengan IPG terendah di Indonesia. Adapun IPG tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara. [53]

Berkaitan dengan masalah gender dalam pembangunan tersebut, organisasi perempuan memegang peranan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berperspektif gender. Misalnya, kelahiran UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu serta UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang mengatur ketentuan kuota 30 persen perempuan di parlemen. Selain itu ditetapkannya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yang diubah menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Kelahiran berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan kelompok perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya.

Dalam capaian pembangunan gender di daerah, secara jelas organisasi perempuan juga memiliki potensi besar sebagai gerakan sosial untuk menciptakan perubahan. Dalam hal ini berupa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Meskipun organisasi memang tidaklah identik dengan gerakan sosial, tetapi tidak bisa dipungkiri organisasi perempuan memiliki potensi besar untuk mendukung

[53] Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Berbasis Gender 2019*. Jakarta, 2019.

perubahan, yaitu mendukung program dan kebijakan pembangunan gender di daerah. Potensi tersebut antara lain dapat dilihat dari dukungan sumber daya yang luar biasa banyak dan ikatan terhadap organisasi yang dikembangkan.[54] Sumber daya yang besar serta ikatan kecintaan terhadap organisasi merupakan elemen yang sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu eksistensi mereka dalam organisasi dapat berperan serta dalam mendukung pembangunan gender di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilaksanakan Soetji Lestari, dkk. menunjukkan bahwa Muslimat NU merupakan organisasi massa perempuan nonpemerintah yang memiliki potensi sangat strategis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui program kerja yang dilakukan.[55] Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, yang memiliki kepengurusan Muslimat NU tingkat cabang, yaitu Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja, walaupun secara umum di Indonesia, pada tingkat kabupaten hanya terdiri dari satu pengurus cabang. Kegiatan pengambilan data, antara lain ditunjukkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Kegiatan FGD dengan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas

[54] Marc Hooghe, "Gerakan Sosial", dalam John T Ishiyama dan Marijke Breuning (eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*. Jakarta: Kencana, 2013, h. 375.

[55] Soetji Lestari, Sofa Marwah, Oktafiani Catur Pratiwi, *Model Hilirisasi Model Hilirisasi Kontribusi Kelompok Perempuan Muslimat NU terhadap Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah*, Laporan Penelitian PSHP Kemenristekdikti, 2017-2018.

Gambar 3. Kegiatan FGD dengan Pengurus Cabang Muslimat NU Sokaraja

Muslimat NU adalah organisasi *under bow* atau perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai badan otonom yang beranggotakan perempuan Muslimah berumur 40 tahun ke atas berpaham *ahlu sunnah wal jamaah*, yaitu paham yang merupakan perpaduan antara tiga pilar utama ortodoksi Islam, yaitu akidah, syariah, serta akhlak. Kepengurusan Muslimat NU terhierarki dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, anak cabang, dan ranting. Jenjang kepengurusan tersebut di seluruh Indonesia dan juga sudah ada sebagian di luar negeri, seperti di Jeddah, Arab Saudi, Malaysia, dan Hongkong. Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarki dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat mengakar dan mendalam sehingga mendukung posisi strategis Muslimat NU. Jaringan kultural terutama mengandalkan basis tradisional, seperti pondok pesantren, kelompok pengajian, kiai dan para guru mengaji. Dukungan keanggotaan yang sangat banyak dan mendalam, menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU untuk mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender sekaligus menjadi *gender vocal point* di masyarakat.

Muslimat NU memiliki dua macam keanggotaan, yaitu pertama anggota *jam'iyah* seperti halnya organisasi NU dan yang kedua adalah anggota *jama'ah.* Pengertian anggota *jam'iah* adalah anggota yang

mengikuti struktur Muslimat, mengikuti aturan-aturan Muslimat, misalnya mempunyai kartu tanda anggota, kemudian aktif mengikuti pengajian-pengajian, dan mungkin mempunyai pakaian-pakaian resmi Muslimat, mengikuti aturan Muslimat, dan segala sesuatu lainnya. Anggota yang demikian termasuk anggota Muslimat secara *jam'iah.* Adapun anggota *jama'ah* adalah anggota simpatisan *nahdliyin* atau NU dalam makna keorganisasiannya. Anggota yang termasuk dalam *jama'ah* adalah perempuan atau ibu-ibu mereka yang dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah mengikuti Islam *aswaja* NU, maka mereka termasuk anggota Muslimat secara *jama'ah*.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ikatan sosial-kultural sebagai anggota. Muslimat lebih menguat justru tanpa perlu label keanggotaan formal dengan bukti kepemilikan kartu anggota Muslimat (Kartamus). Bagi para pendukung Muslimat NU, ikatan sosial-kultural terhadap Muslimat NU jauh lebih penting dibanding memiliki kartu anggota sebagai bentuk ketertiban administrasi. Dalam hal pendanaan, organisasi Muslimat NU adalah organisasi yang mandiri, dengan menggali sumber dana yang bersumber dari iuran anggota dengan istilah lokal *kalengan* atau *pithian*. *Kalengan* atau *pithian* merupakan cara pengumpulan iuran yang dilakukan pada setiap pertemuan pengajian atau lainnya, melalui sumbangan dengan media kaleng atau sejenisnya, dengan masing-masing anggota akan memasukkan iuran seikhlasnya dan kaleng akan berputar dari satu anggota ke anggota lain. Meskipun jumlah iuran yang diberikan tidak seberapa tetapi dilakukan secara rutin oleh jumlah anggota Muslimat NU yang banyak maka hasil iuran juga akhirnya banyak. Secara lengkap hasil penelitian tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1
Identifikasi Potensi dan Permasalahan Muslimat NU pada Tingkat Pengurus Cabang

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
1.	Organisasi	• Kabupaten Banyumas memiliki dua kepengurusan tingkat cabang, yaitu MNU Banyumas dan MNU Sokaraja. Keberadaan dua organisasi dapat memperkuat kinerja keorganisasian dalam berkontribusi kepada masyarakat • Berkaitan dengan faktor kesejarahan MNU Sokaraja dan MNU Banyumas, awalnya terpisah dan bergabung pada tahun 1993-2005 kemudian berpisah kembali sampai sekarang	• Terdapat 6 pengurus anak cabang masuk ke MNU Sokaraja dan 21 pengurus anak cabang masuk MNU Banyumas. • Ada kerisauan beberapa anak cabang yang ingin bergabung dengan MNU Banyumas. • Berkaitan dengan relasi dengan pemerintah, terkadang pemahaman mengenai pengurus cabang hanya satu Muslimat NU Kabupaten Banyumas, tidak membedakan MNU Sokaraja dan MNU Banyumas
2.	Visi Misi	Mengikuti visi misi Muslimat NU Pusat sehingga dalam menjalankan program kegiatan organisasi dapat senantiasa beriringan sejalan dengan visi misi dari hierarkhi atas sampai	Penerjemahan visi misi ke tingkat kepengurusan cabang sampai ke dalam bentuk program kegiatan kurang ada kontrol hierakhisnya dari atas sampai bawah.

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		bawah. Visi Muslimat NU adalah "Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah Swt".	
3.	Bidang organisasi	• Bidang organisasi cukup lengkap mencakup : a) organisasi dan keanggotaan; b) pendidikan dan kaderisasi; c) sosial, kependudukan dan lingkungan hidup; d) kesehatan; e) dakwah; f) ekonomi, koperasi dan agrobisnis; g) tenaga kerja; h) hukum dan advokasi; • Dalam hal adiministrasi organisasi terdapat 12 buku wajib sebagai buku pedoman administrasi dari Muslimat Pusat. • Mengacu pada AD ART Muslimat Pusat, yang tidak ada adalah bidang penelitian, pengembangan,	• Bidang dakwah paling menonjol dalam program kegiatan Muslimat NU. • MNU Sokaraja memiliki koperasi yang belum berbadan hukum • Bidang tenaga kerja dan hukum paling lemah dalam kinerja, baik Muslimat NU Sokaraja maupun Muslimat NU Banyumas.

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		komunikasi dan informasi; hubungan luar negeri dan bidang pengembangan jejaringan.	
4.	Kepemimpinan	Memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemimpinannya, atau nilai trust pada sosok ketua organisasi, direfleksikan dalam kepemimpinan Ibu Muslimah sebagai ketua MNU Sokaraja masuk periode ketiga dan Ibu Laily Manshur sebagai ketua MNU Banyumas masuk periode keempat.	• Keputusan Muslimat Pusat memungkinkan ketua Muslimat dari pusat sampai daerah dipilih seumur hidup selama masih dibutuhkan oleh kader. • Secara internal ada ketakutan para kader untuk menjadi ketua pengurus cabang Muslimat karena harus memenuhi kriteria kemampuan agama, aktif dalam mengerakkan organisasi dan hati yang ikhlas. • Dinamika pengkaderan untuk mempersiapkan pemimpin mendatang menjadi kurang berjalan.
5.	Pengurus	• Dua kepengurusan dalam satu kabupaten berarti	• Tidak semua sumber daya pengurus paham

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		MNU didukung oleh lebih banyak sumber daya. • Seluruh bidang MNU memiliki formasi kepengurusan dengan jumlah yang memadai. • Pengurus sudah mengikuti berbagai pelatihan. • Struktur kepengurusan mengikuti AD ART MNU Nasional, disesuaikan dengan kebutuhan daerah	terhadap tupoksi masing-masing. • Keaktifan masing-masing bidang tergantung pada kapasitas masing-masing pengurus, yang berarti kapasitas masing-masing pengurus kurang berimbang, misalnya bidang hukum dan ketenagakerjaan masih kurang jalan. • Menyadari keterbatasan adanya kemampuan sumber daya tetapi merasa yakin dengan kekuatan keikhlasan dan doa, bahkan dalam perencanaan program seringkali membuat target pencapaiannya.
6.	Kegiatan dan Laporan Kegiatan	• Memiliki begitu banyak kegiatan dalam masing-masing bidang sebagaimana disebutkan di atas, kecuali bidang	• MNU Banyumas sudah memiliki program kerja yang terencana dan laporan kegiatan setiap tahun.

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		hukum dan ketenaga kerjaan. • Program kegiatan bisa bersifat rutin, setiap minggu, setiap hitungan selapan Jawa, setiap bulan atau setiap tahun. • Kegiatan juga dapat bersifat insidental.	• MNU Sokaraja belum memiliki program kerja yang diagendakan secara terencana dan belum ada laporan kerja tahunan.
7.	Ikatan terhadap organisasi	• Para pengurus MNU memiliki nilai-nilai organisasi yang sangat kuat dengan ikatan yang mendarah daging sejak kecil, berawal dari ikatan sebagai warga nadliyin, kemudian berkembang menjadi keterlibatan dalam organisasi NU dan Muslimat, sejak dalam lingkungan keluarga NU. • Menjadi pengurus berawal sebagai jama'ah kemudian jam'iyah seperti halnya dalam organisasi NU. • Menjadi pengurus Muslimat adalah kesadaran, keikhlasan hati, rasa tanggung jawab dan panggilan jiwa.	• Pengurus yang masuk usia senja terkadang kurang agresif untuk menangkap isu-isu sosial kemasyarakatan seperti isu gender. • Umur pengurus MNU bisa mencapai 80-90an
8.	Keanggotaan	• Keanggotan Muslimat terdiri dari dua macam, yaitu	• Saat ini yang terdaftar memiliki kartu

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		anggota *jam'iyah* seperti halnya NU dan anggota *jama'ah*. Anggota Jam'iah berarti mengikuti struktur Muslimat, mengikuti aturan-aturan Muslimat, seperti mempunyai kartu tanda anggota, aktif mengikuti pengajian, mempunyai pakaian resmi Muslimat, dan sebagainya. Adapun anggota jama'ah adalah anggota simpatisan sebagai warga nahdliyin, mengikuti Islam berhaluan *ahlusunnah wal jamaah annahdliyah* atau Aswaja NU. • Didukung oleh anggota ibu-ibu nahdliyin yang berumur 40 tahun ke atas, baik yang memiliki kartu anggota atau tidak.	anggota Muslimat untuk MNU Banyumas sekitar 74 ribu anggota. Adapun di MNU Sokaraja yang memiliki kartu anggota hanya 100an. • Anggota Muslimat baik di MNU Banyumas dan MNU Sokaraja yang tidak memiliki kartu anggota jauh lebih banyak. • Peningkatan keanggotaan secara formal dapat memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki Muslimat
9.	Pendanaan	• Sesuai ketentuan Muslimat Pusat setiap anggota Muslimat NU wajib membayar iuran wajib per bulan per anggota Rp 2000,00. • Di luar itu, para pengurus komitmen pengurus dan	Dukungan dana dari pemerintah daerah bersifat bantuan dengan proses pengajuan pendanaan kegiatan terlebih dahulu dan tidak secara rutin.

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		anggota Muslimat untuk iuran, dengan istilah lokal *pitian, thole-thole, kalengan*, dilakukan setiap ada kegiatan pengajian atau lainnya, yaitu kegiatan rutin bulanan atau tahunan. Iuran seperti itu berkisar Rp 2000 per orang • Tidak ada honor untuk para pengurus Muslimat • Penjualan bahan makanan pokok pada saat kegiatan untuk dibeli sendiri oleh anggota pengurus. • Menyelenggarakan bazar murah secara internal atau ikut dalam bazar murah yang dilakukan pihak-pihak lain, antara lain menjual atribut-atribut Muslimat seperti kalender, syal, jilbab. • Jumlah iuran ribuan rupiah tetapi jumlah terkumpul dapat mencapai puluhan juta setiap tahun • Donatur atau wakaf dari jamaah Nahdliyin dan khususnya Muslimat yang memiliki	

No.	Aspek	Identifikasi	
		Potensi	Permasalahan
		komitmen untuk membangun Muslimat NU	
10.	Jaringan	• Memiliki potensi untuk mendukung ormas underbow NU lainnya seperti IPNU dan IPPNU yang terkadang kedua organisasi tersebut disokong Muslimat untuk penggalangan dana ataupun dukungan kegiatan seperti pengadaan konsumsi • MNU Banyumas sudah tergabung dalam GOW • Jaringan kultural terutama mengandalkan basis tradisional, seperti pondok pesantren, kelompok pengajian, kyai da para guru ngaji	• Jaringan dengan jajaran dinas Pemkab Banyumas masih terbatas, paling banyak yang terkait dengan pendidikan, karena Muslimat mengelola PAUD dan TK, yaitu dengan Dinas Pendidikan, dan Depag. • Hanya MNU Banyumas yang tergabung dalam GOW

Sumber : Soetji Lestari, Sofa Marwah, Oktafiani Catur Pratiwi, *Model Hilirisasi Model Hilirisasi Kontribusi Kelompok Perempuan Muslimat NU terhadap Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah*, Laporan Penelitian PSHP Kemenristekdikti, 2017-2018.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa anggota Muslimat NU sangat patuh mengikuti visi misi Muslimat NU Pusat sehingga dalam menjalankan program kegiatan organisasi dapat senantiasa beriringan sejalan dengan visi misi dari hierarki pusat sampai ranting dan anak ranting. Artinya ketika Muslimat NU memiliki program kerja yang sejalan dengan masalah pembangunan gender, maka sejalan dengan visi misi yang ditetapkan, maka dukungan Muslimat NU berpotensi besar memengaruhi kebijakan pembangunan gender. Para anggota Muslimat

NU memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemimpinannya, atau nilai *trust* pada sosok ketua organisasi, sehingga sangat jarang pimpinan Muslimat NU baik di tingkat pusat sampai daerah yang hanya memimpin satu kali periode kepemimpinan. Dalam konteks demikian, hal tersebut menjadikan kaderisasi dalam tubuh internal Muslimat NU terkadang belum berjalan maksmimal. Selain itu, meskipun dalam perkembangannya banyak kader Muslimat NU yang berkualitas, tetapi kapasitas kader masih cenderung tidak merata. Dalam hal ini, masih cukup banyak kader yang perlu didorong khusus kapasitasnya.

Selain itu, Muslimat NU memiliki bidang organisasi yang cukup lengkap untuk mendukung keberhasilan pembangunan gender, yaitu mencakup: a) organisasi dan keanggotaan; b) pendidikan dan kaderisasi; c) sosial, kependudukan dan lingkungan hidup; d) kesehatan; e) dakwah; f) ekonomi, koperasi dan agrobisnis; g) tenaga kerja; h) hukum dan advokasi. Dalam mengelola organisasi, para pengurus Muslimat NU memiliki nilai-nilai organisasi yang sangat kuat dengan ikatan yang mendarah daging sejak kecil, berawal dari ikatan sebagai warga nadliyin, kemudian berkembang menjadi keterlibatan dalam organisasi NU dan Muslimat, sejak dalam lingkungan keluarga NU. Sebagai pengurus Muslimat NU, mereka dipenuhi oleh jiwa kesadaran, keikhlasan hati, rasa tanggung jawab dan panggilan jiwa. Selain itu, Muslimat NU memiliki jaringan yang cukup kuat dalam GOW (Gabungan Organisasi Wanita) sehingga sangat memungkinkan bekerja sama untuk mendukung kebijakan pembangunan gender. Selain itu, Muslimat NU juga memiliki jaringan ormas *underbow* NU lainnya seperti IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Anshor, dan sebagainya.

Kecintaan aktivis Muslimat NU terhadap Muslimat dan NU dalam kerangka besar kecintaan kepada Islam, dan tentu saja Al-Quran dam Hadist. Bahwasanya dalam Islam diyakini bahwa Allah akan melakukan memperlakukan umatnya yang baik jika mereka juga melakukan kebaikan, baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks demikan, perempuan aktivis Muslimat juga meyakini bahwa Allah memberikan posisi yang sangat mulia terhadap perempuan, dan dicantumkan pada surat Annisa dalam Al-Qur'an dengan segala uraiannya. Bahkan mereka yang ditempatkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi kaumnya. Keyakinan yang demikian banyak mendasari para aktivis Muslimat untuk berkontribusi di manapun berada, mulai dari tingkatan kepengurusan ranting (desa), anak cabang (kecamatan), cabang (kabupaten), dan seterusnya ke atas. Banyak mereka yang menjadi aktivis Muslimat juga memulainya dari sejak mereka remaja sampai usia lanjut. Semata-mata keterlibatan tersebut karena keyakinan kepada Tuhannya untuk dapat hidup yang bermanfaat bagi sesamanya, dan juga kepada organisasi kebanggannya, Muslimat NU.

Dalam konteks di atas, komitmen dan kiprah Muslimat NU dalam bidang sosial, keagamaan, ekonomi masyarakat telah mencerminkan kehidupan *lifeworld* nyata dari kelompok organisasi perempuan. Komitmen mereka untuk mendorong kualitas yang lebih baik dalam kehidupan agama, keluarga, masyarakat dan bangsa telah menunjukkan kehidupan yang jauh dari bentuk kekuasaan politik dan penguasaan ekonomi. Mereka mencerminkan kelompok *civil society* yang memiliki kehidupan dengan tindakan sosial didorong oleh nilai dasar yang muncul dalam kehidupan sosial seperti keadilan, kebenaran, kebaikan, dan sebagainya. [56] Eksistensi Muslimat NU sebagai kelompok perjuangan perempuan yang secara teoritis merujuk pada karakter *civil society*. *Civil society* adalah ruang terpisah bagi organisasi, menjadi bentuk komunikasi dan wacana yang reflektif, penguasaan individu atau kelompok yang bertindak secara kolektif serta menyebarkan alat sipil untuk mempengaruhi negara serta kebijakannya, tetapi tidak untuk mengambil kekuasaan negara, dan tidak dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan.[57] Selain karena secara kuantitas banyak, Muslimat NU juga bergerak pada berbagai level, dari tingkat pusat sampai daerah, dengan membawa isu-isu pemajuan perempuan di berbagai bidang. Mereka bergerak bukan untuk menguasai negara, tetapi demi kemajuan kelompok perempuan.

3.2 Dinamika Muslimat NU dalam Relasinya dengan Negara

Menurut Dawam Rahardjo masyarakat Indonesia mempunyai tradisi *civil society* yang cukup kuat, terbukti dengan organisasi-organisasi yang dikenal dengan independensinya, seperti organisasi buruh, tani, cendekiawan, perempuan, pemuda dan sebagainya. Bahkan dua di antaranya, Muhammadiyah dan NU sampai sekarang masih bertahan. [58] Keberadaan Muhammadiyah dan NU juga memiliki keanggotaan yang sangat banyak di seluruh Indonesia, dari perkotaan hingga pedesaan. Sejauh ini keduanya relatif masih merupakan organisasi *non state* yang bertindak untuk mencapai kepentingan bersama, sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berwacana, relatif tidak bergantung pada negara serta merupakan sarana untuk mempengaruhi kebijakan negara. Mungkin NU dan Muhammadiyah adalah pondasi dari gerakan *civil society* di Indonesia. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, lahirnya

[56] Stephen K White, *"Skeptics at The Celebration: Civil Society and Early Frankfurt School",* dalam Nancy L Rosenblum & Robert C Post, *Civil Society and Government*. Princeton: Princenton University Press, 2002, h. 146.

[57] Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia*. Stanford California: California University Press, 2004. h. 9.

[58] Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999, h. 159.

Indonesia pun tidak lepas dari perjuangan panjang *civil society,* dengan NU dan Muhammadiyah menjadi bagian di dalamnya.

Tetapi harus diingat pula, bahwa keberadaan sebuah kelompok masyarakat dapat dianggap sebagai pengejawantahan *civil society* yang ideal atau tidak, dapat saja tidak berlaku secara terus menerus. Dalam realitasnya, kemandirian yang tinggi, *vis a vis* negara atau menarik jarak dari kepentingan ekonomi dan politik, tidak selalu bisa dipenuhi oleh organisasi-organisasi *civil society*. Ini artinya, mereka dalam peranan dan kiprahnya, selalu dalam berada keadaan proses pasang surut. NU dan Muhammadiyah misalnya, dalam sejarah perkembangannya juga dipenuhi oleh proses tarik ulur antara kemandirian dan campur tangan negara.

Jika menilik sejarah terbentuknya Muslimat NU tidak lepas dari keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk yang telah lebih dulu berkembang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai relasi Muslimat NU dengan negara tidak bisa lepas dari bagaimana NU sebagai organisasi utama yang menaungi Muslimat memiliki relasi dengan negara. NU adalah organisasi keagamaan yang didirikan oleh para ulama yang memiliki wawasan keagamaan, dengan memegang teguh salah satu mahdzab. Secara terminologi, *nahdlatul ulama* berarti kebangkitan para ulama. Organisasi NU didirikan secara formal pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

Setelah beberapa dasa warsa, NU berkembang melebar dari garis-garis perjuangan (Khittah 1926) yang telah dirumuskan. Persentuhan NU dengan dunia politik dimulai ketika NU masuk menjadi anggota MIAI (Majlisul Islam A'la Indonesia) tahun 1939.[59] Meskipun MIAI adalah organisasi keagamaan, tetapi kegiatan MIAI sarat dengan muatan politik. Kelak MIAI berubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Semasa pendudukan Jepang dan perang mempertahankan kemerdekaan, NU terlibat dalam kegiatan politik dengan membentuk kekuatan militer Hizbullah. Selanjutnya NU secara resmi menjadi organisasi politik pada tahun 1952. Ketika itu, NU menyatakan diri keluar dari Masyumi dan memutuskan untuk berubah menjadi partai politik.

Pada masa tersebut, Muslimat NU sudah berdiri sebagai organisasi perempuan muslimah yang menjadi *underbow* NU. Pada saat penyelenggaraan Muktamar NU di Surabaya pada tahun 1954, disepakati agar aktivis Muslimat NU dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-DPRD

[59] A Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 1995, h.52

dan *konstituante* sebagai calon prioritas.[60] Ketika Pemilu 1955 dilaksanakan, partai NU menjadi salah satu kontestan pemilu. Keikutsertaan partai NU dalam pemilu tersebut membuahkan hasil sebagai pemenang pemilu peringkat ke-3 dengan perolehan suara 18,4% atau memiliki 45 kursi di parlemen. Adapun Partai Masyumi menempati peringkat ke-2 setelah PNI dan NU menempati peringkat ke-3 di atas PKI. [61]

Dalam pemilu tahun 1955 tersebut, NU mendapat 45 kursi. Dari sejumlah kursi tersebut, Muslimat NU memiliki lima wakil (11 persen) dari seluruh perwakilan Partai NU. Kelima tokoh Muslimat NU yang menjadi anggota DPR saat itu adalah; Machmudah Mawardi (Jawa Tengah), Maryam Kantasumpena (Jawa Tengah), Maryama Djunaidi (Jawa Timur), Hadiniyah Hadi (Jawa Timur), dan Asmah Syahruni (Kalimantan Selatan). Adapun untuk Konstituante, Muslimat NU menempatkan enam orang wakilnya, sedangkan di MPR, Muslimat NU menempatkan dua orang kadernya menjadi anggota MPR.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, seiring dibubarkannya Masyumi oleh Soekarno, Partai NU menjadi partai umat Islam yang terbesar. Kiprah NU dalam Demokrasi Terpimpin ditandai dengan sikap akomodatif NU dengan menerima konsep Nasakom, tetapi tetap menolak komunisme. Nasakom adalah ideologi yang diusung oleh Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Penerimaan NU terhadap Nasakom didasarkan atas nilai-nilai Islam, yaitu *ma la yudraku kulluhu la yudraku ba'dhuhu* yang berarti apa yang tidak dapat diraih keseluruhan, sebagian (yang dapat diraih) jangan dilepaskan. [62] Pada tahun 1960, ketika kekuasaan Soekarno berlangsung sangat kuat melalui pemberlakuan Demokrasi Terpimpin, Soekarno melakukan pembubaran DPR dan membentuk DPR Gotong Royong. Saat itu, wakil dari Muslimat bertambah dua orang, dengan lima orang wakil sebelumnya tetap menjadi anggota DPR Gotong Royong.

Ketika perkembangan PKI signifikan pada era tersebut, NU mengambil posisi sebagai pihak yang konfrontatif melawan PKI, dengan kekuatan utama dari unsur pemuda Anshor. Dalam hal ini, Muslimat NU ikut merespon untuk menahan masifnya perkembangan PKI ketika itu. Muslimat NU menyelenggarakan pelatihan ketrampilan dalam hal bongkar pasang senjata, menanggulangi bahaya kebakaran, mengelola

[60] *Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU*, 30 Maret 2015, dalam http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu diakses tanggal 1 Juni 2019.

[61] Herbert Feith, 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1999, h.123.

[62] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992, h. 1

dapur umum, keperawatan, dan keterampilan lain yang diperlukan dalam keadaan darurat. Ketika itu kegiatan Muslimat NU dipusatkan di Gedung Pusat Hansip Salemba Raya pada tahun 1964. Ketika pemberontakan G 30 September 1965 meletus, Muslimat NU menjadi salah satu organisasi yang menuntut pembubaran PKI. Demonstrasi dilakukan bersama dengan organisasi perempuan lainnya yang anti PKI. Tuntutan yang diajukan oleh Muslimat NU ketika itu antara lain agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengambil alih TK Melati yang dikelola oleh Gerwani. [63] Adapun Gerwani merupakan perkumpulan perempuan di Indonesia pada era 1965an yang keberadannya dikaitkan dengan PKI. Seiring terjadinya pemberontakan 30 September 1965, keberadaan Gerwani menjadi bahan studi yang penuh misteri. Studi Wieringa yang berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI* bahkan menyimpulkan bahwa Gerwani sebagai organisasi perempuan terbesar pada masa itu, telah dihancurkan oleh militer dan menjadi dasar bagi pembungkaman gerakan perempuan di Indonesia setelah Orde Baru berkuasa.[64]

Selanjutnya sepanjang kekuasaan Orde Baru, dapat dikatakan hubungan NU dengan rezim berkuasa kurang harmonis. Pada Pemilu 1971 NU masih memperoleh suara 18,7% dari keseluruhan suara masuk. Perolehan suara itu menunjukkan posisi NU masih menjadi kekuatan politik yang cukup dominan dan tidak bisa diabaikan. Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengharuskan fusi partai dan NU bersama-sama dengan PSII, Parmusi dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada penyelenggaraan Pemilu 1977, kekuatan NU dalam PPP berkurang seiring ketetapan untuk membagi kekuatan dalam semua unsur PPP. [65] Sejalan dengan fusi yang dilakukan oleh NU dalam PPP, maka hal itu juga menjadi tantangan berat bagi Muslimat. Ketetapan Orde Baru untuk penyederhanaan partai tersebut, juga menjadikan pegawai negeri atau istri pegawai negeri, guru, dan karyawan BUMN merasa takut untuk terlibat dalam kegiatan Muslimat NU. Dengan kata lain, kebijakan Orde baru untuk mengooptasi gerakan perempuan di Indonesia, juga berdampak pada bagaimana Muslimat NU dapat terus tumbuh dan berkembang. Dengan adanya ketakutan atau kekhawatiran perempuan *nahdliyin* yang menjadi istri para pegawai negeri misalnya, menjadikan tidak semua perempuan *nahdliyin* dapat berpartisipasi dalam

[63] *Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU*, 30 Maret 2015, dalam http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu diakses tanggal 1 Juni 2019.

[64] Saskia Elenora Wirienga, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galangpres.

[65] Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS, 1994, h. 93.

kegiatan Muslimat NU karena mengkhawatirkan posisi atau jabatan suaminya. Dengan demikian, ketika hubungan NU dan pemerintah Orde Baru berjalan kurang harmonis atau tersegregasi, maka keberadaan Muslimat NU ikut juga terdampak atau ikut termarginalkan.

Adapun Pemilu 1982 adalah puncak polarisasi dari kekuatan-kekuatan dalam unsur PPP. Situasi demikian menjadikan NU menyatakan diri keluar melalui keputusan yang diambil dalam Muktamar di Situbondo tahun 1983. Sejak itulah NU menetapkan diri untuk kembali pada Khittah 1926 sebagai garis perjuangan NU dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Berkaitan dengan kembalinya NU ke Khittah 1926, hal itu juga menjadikan Muslimat NU memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai organisasi sosial keagamaan sesuai dengan Khittah NU 1926 hingga sekarang ini. [66]

Seiring kejatuhan rezim Orde Baru pada Era Reformasi, muncullah begitu banyak partai politik yang merepresentasikan beragam kelompok yang ada di masyarakat. Warga *nahdliyin* yang konsisten memegang Khittah 1926 tetap menjadikan NU tetap sebagai organisasi sosial keagamaan. Walaupun demikian, hasrat terpendam untuk ikut serta berkecimpung dalam politik disalurkan melalui pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998. Inisiator berdirinya PKB adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal sebagai cucu ulama terkemuka NU yaitu KH. Hasyim Asyari. Pendirian PKB juga didukung oleh ulama-ulama terkemuka NU seperti KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bisri, KH. Muhith Muzadi, dan sebagainya. Berturut-turut dari Pemilu 1999, PKB secara nasional memperoleh suara 12,61 persen dan pada Pemilu 2004 mendapatkan 10,57 persen. Selanjutnya pada Pemilu 2009 mendapatkan 4,94 persen, dan pada Pemilu 2014 mendapatkan suara 9, 04 persen. PKB tumbuh dan berkembang menjadi partai yang memiliki basis massa utama dari warga nahdliyin. Adapun NU tetap menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga kini.[67]

Dalam konteks di atas, hubungan kelembagaan atau hubungan formal antara Muslimat NU dengan PKB sesungguhnya juga tidak ada. PKB notabene adalah partai politik yang didirikan oleh warga NU. Demikian pula, Muslimat NU juga tidak memiliki hubungan formal dengan partai politik yang lain, seperti PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat dan partai politik lainnya. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa kecenderungan umum para kader perempuan *nahdliyin* ataupun mereka yang menjadi kader Muslimat NU, partisipasi mereka atau bahkan mungkin aktivitas politik mereka, lebih banyak di lingkungan PKB.

[66] Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, h. 166.
[67] Mengenai kelahiran dan dinamika politik PKB dapat dilihat secara lengkap dalam www.pkb.id diakses tanggal 8 Juni 2019.

Berkaitan dengan keberadaan PKB tersebut, maka sulit untuk dapat dipungkiri bahwa banyak aktivis perempuan dari Muslimat NU yang turut berkembang dalam arena politik nasional maupun daerah. Keikutsertaan tersebut mengatasnamakan pribadi. Dengan demikian, ketika NU dan Muslimat NU tetap teguh memegang Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan, tetapi tidak bisa dihindari banyak tokoh-tokohnya yang terlibat dalam kehidupan politik. Sejarah dan perkembangan Muslimat NU juga telah membuktikan bahwa dinamika Muslimat seolah tidak bisa lepas dari konteks situasi politik yang melingkupinya.

Dalam konteks perempuan tokoh politik dari kalangan Muslimat NU, ingatan publik tidak akan lepas dari sosok Khofifah Indar Parawansa yang menjadi Ketua Muslimat NU nasional sejak tahun 2000. Khofifah yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023 yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018, sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Sosial masa Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), semakin banyak aktivis Muslimat NU yang tampil dan berhasil dalam memenangkan kontestasi tersebut. Dalam waktu bersamaan dengan terpilihnya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Pilkada serentak tahun 2018, beberapa aktivis Muslimat NU lainnya yang mengikuti kontestasi pilkada juga berhasil terpilih. Beberapa diantaranya adalah Munjidah Wahab yang terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023 dalam Pilkada 2018. Munjidah Wahab adalah Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Jombang. Selain itu, Ika Puspita Sari, bendahara PC Muslimat NU Mojokerto juga terpilih sebagai Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Mojokerto 2018. Demikian pula Umi Azizah, yang terpilih sebagai Bupati Tegal dalam Pilkada 2018. Umi Azizah adalah ketua PC Muslimat Tegal. Pada periode sebelumnya, Umi Azizah adalah petahana wakil bupati yang naik menjadi Bupati Tegal karena bupati Tegal sebelumnya wafat pada periode pertengahan kepemimpinannya. Aktivis Muslimat NU lainnya adalah Ana Mu'awanah yang menjadi Sekretaris PC Muslimat Bojonegoro juga terpilih sebagai Bupati Bojonegoro dalam gelaran Pilkada Bojonegoro 2018.

Selain itu, dalam pentas pemilu legislatif tahun 2019, para kader Fatayat NU juga banyak yang berhasil di level nasional sebagai anggota DPR RI. Fatayat NU merupakan organisasi *under bow* NU lainnya yang rata-rata beranggotakan perempuan NU yang relatif muda umurnya dibandingkan dengan ibu-ibu *nahdliyin* yang tergabung dalam Muslimat NU. Mereka adalah Anggia Ermarini, Ketua Umum PP Fatayat NU; Nur

Nadlifah Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan PP Fatayat NU; Siti Mukaromah, ketua Bidang Advokasi, Hukum, dan Politik PP Fatayat NU; Eem Marhamah, Sekretaris Bidang Dakwah PP Fatayat NU; Arzeti Bilbina Koordinator Bidang Ekonomi PP Fatayat NU; Nihayatul Wafiroh Wakil Koordinator Bidang Advokasi Hukum dan Politik PP Fatayat NU; Ela Siti Nuryaman Anggota Bidang Kesehatan PP Fatayat NU; serta Wartiah Ketua PW Fatayat NU NTB dan Ema Umiyyatul Chusnah, ketua PC Fatayat NU Jombang. Seluruh pengurus Fatayat NU yang terpilih menjadi anggota pemilu legislatif berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kecuali Wartiah dan Ema Umiyyatul Chusna yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mengingat keberadaan Muslimat NU adalah organisasi perempuan Islam yang bergerak dalam ranah sosial keagamaan dan tetap mengacu Khittah 1926 bukan sebagai organisasi politik, tampilnya aktivis Muslimat NU dalam kontestasi dan memenangkan perebutan kursi gubernur, bupati ataupun walikota adalah sesuatu yang menarik. Untuk itu bab berikut ini akan membahas lebih lanjut fenomena tersebut, dengan memilih beberapa contoh kasus keikutsertaan beberapa aktivis Muslimat NU dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

BAB IV
PENGALAMAN KADER-KADER MUSLIMAT DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL

4.1 Kemenangan Mutlak Umi Azizah dalam Pilkada Kabupaten Tegal

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung Kabupaten Tegal tahun 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ketiga pasangan tersebut adalah Rusbandi dan Fatchuddin yang diusung Partai Golkar dan PPP, dan mendapatkan 8,81 persen suara; pasangan Bagas Prakosa dan Drajat Adi yang dicalonkan oleh PDIP, Partai Demokrat dan Nasdem dan memperoleh 20,28 persen suara; serta pasangan Umi Azizah dan Sabillah Ardie yang dicalonkan oleh PKB, PAN, Gerindra, Hanura serta PKS, yang mampu memperoleh suara 70,91 persen. Umi Azizah sendiri adalah calon petahana, yaitu sebagai Wakil Bupati Tegal pada periode sebelumnya. [68]

Latar belakang Umi Azizah adalah ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Tegal. Sebagai pemimpin dari organisasi perempuan Islam, Umi Azizah telah memegang amanah jabatan ketua Cabang Muslimat NU untuk periode ketiga. Secara keorganisasian, Muslimat NU memiliki keunggulan antara lain dalam ikatan sosial budaya yang sangat kuat mengikat organisasi dan ketaatan kepada pemimpin. Dengan demikian yang muncul adalah bentuk kepatuhan para kader Muslimat kepada pimpinan mereka. Tidak jarang sebagai ketua bahkan harus berkorban secara finansial yang cukup besar, ditambah pengorbanan fisik dan waktu. Bahkan seorang pemimpin organisasi Muslimat seringkali juga merangkap jabatan. Seperti seorang ketua pengurus cabang sekaligus juga ketua yayasan pendidikan yang dikelola Muslimat NU. Pada prinsipnya, pimpinan Muslimat, Umi Azizah harus dapat membagi waktu antara mengurus rumah, menjalankan kegiatan organisasi, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan bahkan pekerjaan yang bersifat produktif atau mata pencaharian. [69] Kegiatan pengambilan data dengan Umi Azizah, dapat dilihat dalam Gambar 3 berikut ini.

[68] https://kab-tegal.kpu.go.id diakses tanggal 20 September 2019.

[69] Sumber informasi dalam sub-bab ini seluruhnya berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Azizah, Bupati Tegal periode 2018-2023 pada tanggal 1 Agustus 2019.

Gambar 4. Wawancara dengan Ketua PC Muslimat Tegal/Bupati Tegal

Umi Azizah bukan lahir dari kalangan yang berada. Dari kecil, kedua orang tuanya membiasakan kepada anak-anaknya untuk hidup secara mandiri. Orang tua Umi Azizah adalah seorang petani biasa. Semangatnya untuk meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, mendorong Umi Azizah untuk mencari penghasilan sendiri dengan membuat kerajinan tangan dan parsel hari raya, sehingga dirinya tidak lagi mengandalkan pemberian uang kuliah dari kiriman orang tuanya. Seiring dengan kebiasaan di lingkungan desanya, orang tua Umi Azizah menginginkan dirinya menikah muda yaitu ketika menginjak kuliah Semester IV. Seiring dengan tekadnya untuk lulus, proses menjalani kehidupan rumah tangga dan kuliah dapat dijalaninya sampai lulus, bahkan dengan predikat *cumlaude*. Kecintaannya pada desa kelahirannya mendorong dirinya dan suaminya kembali ke desa dengan menjalani usaha kecil-kecilan.

Perhatian Umi Azizah terhadap sesama mendorongnya untuk aktif di organisasi Fatayat NU, di tingkat ranting. Selain melaksanakan pengajian, Umi Azizah juga mengajak para kader Fatayat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Keseriusan dan kapasitasnya dalam memimpin Fatayat di tingkat kecamatan, sampai akhirnya menjadi ketua Muslimat NU di tingkat kecamatan. Seiring dengan berdirinya PKB sebagai partai yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh NU, dirinya juga ikut terdorong menjadi juru kampanye partai tersebut. Saat itu, ia sudah menjadi Ketua II di PAC Muslimat NU Tegal dan merangkap ketua pengurus anak cabang salah satu kecamatan.

Ikatan kultural kepada Muslimat NU dan NU yang dapat disebut sebagai ikatan sebagai sesama warga *nahdliyin* menjadikan paling banyak perempuan Muslimat NU mendukung PKB. Meskipun secara formal Muslimat NU menjaga tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi kenyataannya keterlibatan Muslimat NU dalam kegiatan PKB tidak dapat dihindari. Hal tersebut diakui oleh Umi Azizah yang saat ini menjabat Bupati Tegal untuk periode 2018-2023, bahwa Muslimat NU dilibatkan untuk mendukung perolehan suara PKB dalam perhelatan pemilu legislatif. Terkait dengan keikutsertaannya pada Pilkada Tegal, Umi Azizah menegaskan kalau pada awalnya dirinya tidak mau dicalonkan. Pertimbangannya adalah pilkada membutuhkan modal yang sangat besar, lebih kurang 1 milyar, padahal dana sebesar itu dapat digunakan untuk berbisnis. Hal yang menarik ketika Umi Azizah mengakui adanya dukungan penuh secara kelembagaan dari Muslimat NU, termasuk dukungan dari dari para kiai perwakilan dari berbagai anak cabang. Oleh karena itu Umi Azizah memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Tegal 2018.

Keberhasilan Umi Azizah sebagai Bupati Tegal membuat keberadaan Muslimat NU sebagai organisasi perempuan berbasis *jami'ah* nahdliyin lebih mendapatkan tempat dalam konteks politik dan pembangunan di daerah. Sedikit banyak situasi ini berbeda pada masa sebelumnya, dengan Muslimat NU seolah sebagai organisasi perempuan Islam yang "kurang dianggap". Keberhasilan Umi Azizah menjadi Bupati Tegal tak pelak juga menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas kader-kader Muslimat. Dalam pandangannya, sebenarnya ketika era reformasi pandangan terhadap Muslimat NU tidak jauh berbeda dengan masa Orba, dengan eksistensi Muslimat NU kurang diakui. Oleh karena itu, keberhasilan Umi Azizah dan kader-kader lainnya dalam kontes politik seolah menjadi angin perubahan terkait cara pandang terhadap Muslimat NU.

Selama ini keberadaan Muslimat NU seringkali hanya dianggap sebagai kelompok ibu-ibu *nahdliyin* yang hanya berkutat dalam pengajian dan kegiatan lainnya yang bersifat domestik seperti lomba memasak, ketrampilan membuat hiasan rumah atau lainnya. Meskipun mereka memiliki anggota yang luar biasa banyak, mereka kurang dilihat sebagai satu kekuatan politik tertentu. Bahkan tidak jarang pula masyarakat meremehkan kemampuan kader Muslimat yang dalam kontestasi politik. Di sisi lain, tidak jarang keikutsertaan seorang tokoh Muslimat dalam pentas politik justru dianggap merugikan Muslimat NU. Kepolosan –baca ketulusan- dalam memahami hingar bingar dalam pertarungan politik menjadikan keikutsertaan kader Muslimat NU dalam praktik politik akan berakibat menjadikan Muslimat NU terbengkalai atau tidak ada yang mengurusi. Hal tersebut terutama terjadi jika yang akan masuk ke pentas

politik adalah pucuk pimpinan di level Pengurus Cabang Muslimat (Muslimat NU di level kabupaten).

Upaya yamg dilakukan Umi Azizah untuk memenangkan Pilkada antara lain dengan melakukan sosialisasi dan secara jujur menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai dana kampanye yang besar. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan bersama dengan warga seperti, jalan sehat, pengajian, haul, dan sebagainya. Dalam kontestasi yang sengit karena menghadapi dua calon bupati dan wakil bupati, dukungan modal sosial yang dimiliki oleh Umi Azizah terbukti sangat efektif memberi kontribusi besar bagi kemenangan yang diraih oleh Umi Azizah beserta pasangannya.

Hal yang menarik lainnya bahwa Muslimat NU sebagai kekuatan politik juga dapat menjadi "alat untuk *bargaining position*". Situasi demikian tampak ketika dua bulan setelah pelantikan Umi Azizah sebagai bupati, dengan PKB sebagai partai politik pendukungnya tidak menunjukkan gerakan atau gebrakan mendukung jalannya pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Umi Azizah. Akhirnya Umi Azizah menegaskan kepada PKB jika tidak mendukung jalannya pemerintahan-nya, maka pada Pemilihan Legislatif 2019, Umi Azizah menyatakan Muslimat NU Kabupaten Tegal tidak akan digerakkan untuk mendukung PKB. Sebuah pola timbal balik yang sangat efektif mendukung kepemimpinan dalam pemerintahan di level daerah. Pola ini menjadi sangat efektif mengingat antara PKB dan Muslimat memiliki basis pendukung yang sama, yaitu warga *nahdlyin,* dan tidak jarang kader PKB juga berasal dari aktivis Muslimat NU.

Pada dasarnya naiknya pimpinan Muslimat NU sebagai kepala daerah, pasti akan bermanfaat bagi kemajuan Muslimat NU sendiri. Sebaliknya, pengalaman dalam mengelola organisasi Muslimat, juga bermanfaat dalam mengelola dan mengembangkan pemerintahan di level daerah. Hal tersebut sebagaimana diakui oleh Umi Azizah dalam menjalankan pemerintahan daerah, dengan latar belakang ketua Muslimat NU Kabupaten Tegal dalam tiga periode. Program-program yang bagus dapat dikembangkan ketika memimpin Muslimat NU, selanjutnya dapat bermanfaat untuk diterapkan di pemerintahan daerah. Hal tersebut antara lain dalam hal pemahaman *up date* masalah krusial yang dihadapi oleh masyarakat bawah, yang sebelumnya kurang terjangkau oleh pemerintah daerah, tetapi dengan pengalaman dan modal sosial yang dimiliki, Umi Azizah sangat mudah untuk turun ke bawah untuk memahami masalah warga yang sesungguhnya. Walaupun demikian, keberadaanya sebagai bupati dengan latar belakang ketua Muslimat, tidak hanya menjadikan Muslinat sebagai prioritas, tetapi juga ormas lainnya seperti Aisyiah.

Umi Azizah pada masa kampanye menjadi bupati tidak mendapatkan kampanye yang menyudutkannya. Hal itu karena

keikutsertaannya dalam kandidasi bupati mendapatkan dukungan penuh dari Muslimat NU dan para kyai. Ketika dirinya sudah menjabat sebagai bupati Tegal, posisinya sebagai ketua PC Muslimat NU Kabupaten Tegal juga tidak berubah, dan bahkan ketika itu masuk periode ketiga. Dalam kapasitas Umi Azizah sebagai Bupati Tegal, dirinya dapat menunjukkan bahwa kader Muslimat dapat diandalkan. Sebagai perempuan, dirinya diakui lebih teliti, tanggung jawab, dan jujur. Semua kinerja yang dilakukannya dapat ditunjukkan dengan hasil baik dan sebagai perempuan kader Muslimat NU, Umi Azizah menunjukkan kapasitasnya bahwa dirinya mampu dan dapat diandalkan.

4.2 Dominasi Munjidah Wahab dalam Pertarungan Pilkada Kabupaten Jombang

Pilkada Jombang Tahun 2018 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Munjidah Wahab dan Sumrambah yang diusung oleh PPP, Partai Demokrat, Gerindra dan Perindo; pasangan Nyono Suharli Wihandoko dan Subaidi Muhtar yang diusung oleh Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS, dan PAN; serta Syarifudin dan Choirul Anam yang diusung oleh PDIP dan Hanura. Hasil pilkada menunjukkan bahwa pasangan Munjidah Wahab dan Sumrambah memenangkan pilkada dengan meraih suara 48,3% suara, adapun Nyono Suharli Wihandoko dan Subaidi Muhtar mendapatkan suara 34,3%, serta pasangan Syarifudin dan Choirul Anam memperoleh suara 16,8%.[70]

Munjidah Wahab mengenal dan belajar organisasi sejak dirinya kecil. Keluarganya memiliki nama besar dalam sejarah berdirinya organisasi NU pada masa lampau.[71] Nama Wahab adalah salah satu nama besar dalam perkembangan NU. Ayah Munjidah Wahab adalah salah satu pendiri NU, di samping KH. Hasyim Asyari, yaitu KH Wahab Chasbullah. KH. Wahab Chasbullah adalah kyai yang mengusulkan kepada KH. Hasyim Asyari untuk mendirikan NU pada tahun 1926 di Surabaya. Sebelumnya, KH. Wahab Chasbullah telah memulai merintis berbagai lembaga keislaman, antara lain dengan mendirikan sekolah Islam *Nahdlatul Wathan* tahun 1916, forum diskusi *Taswirul Afkar*, organisasi pemuda muslim *Sjubbanul Wathan*, dan organisasi koperasi pedagang *Nahdlatul Tujjar*. [72] Oleh karena tidaklah mengherankan bila darah berorganisasi begitu kuat mengalir dalam diri Munjidah Wahab. Keikutsertaan Munjidah Wahab dalam organisasi disebutnya bukan paksaan dari orang tua agar mengikuti jejak mereka. Tetapi baginya, aktif

[70] http://kpu-jombangkab.go.id diakses tanggal 23 Oktober 2019.
[71] Sumber informasi dalam sub-bab ini seluruhnya berdasarkan hasil wawancara dengan Munjidah Wahab, Bupati Jombang periode 2018-2023 pada tanggal 9 November 2019.
[72] Martin van Bruinessen, NU, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS, 1994, h. 35.

di organisasi adalah panggilan hati, dan sejak sekolah dasar dirinya sudah ikut orang tuanya ikut rapat-rapat organisasi. Ketika dirinya kelas tiga sekolah dasar, orang tuanya sudah mengajak untuk ikut Kongres NU di Solo. Munjidah mulai aktif berorganisasi ketika kedua orang tuanya berhenti dari organisasi karena usia sudah menginjak senja.

Hingga kini, saudara kandung Munjidah juga aktif dalam keorganisasian NU. Semuanya aktif di struktur organisasi NU, seperti di PBNU, pimpinan NU DKI Jakarta, Fatayat, dan sebagainya. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang mencari ilmu dan mengembangkan keorganisasisan di luar Jombang, dirinya adalah anak bungsu dari keluarga Wahab Chasbullah, yang berkiprah di Jombang saja ketika menempuh pendidikan dan aktif di organisasi. Harapan orang tuanya agar tetap ada yang meneruskan untuk tetap aktif berorganisasi di Jombang. Ketika ia mulai aktif dalam organisasi NU yaitu Fatayat, Munjidah langsung menjadi pimpinan cabang, tanpa melalui kepengurusan di tingkat ranting dan anak cabang. Dukungan keluarganya sangat membantunya untuk terus mengembangkan karir, hingga dirinya mulai masuk di kepengurusan Partai NU tahun 1971. Ketika NU masih menjadi partai politik, Fatayat dan Muslimat menjadi organisasi yang tidak terpisahkan di dalamnya, sehingga dirinya tetap bisa aktif di keormasan dan kepartaian. Selain aktif di Fatayat dan Muslimat, ia juga aktif di Kammi. Organisasi seolah sudah mendarah daging dalam hidupnya dan tidak dapat terpisahkan.

Gambar 5. Wawancara dengan Ketua PC Muslimat NU Jombang/Bupati Jombang

Munjidah Wabah menjadi anggota DPRD Jombang sejak tahun 1971 melalui Partai NU. Pada tahun 1973 karena ada kebijakan nasional fusi partai, maka Munjidah Wahab aktif di PPP. Saat itu, warga *nahdliyin* lebih banyak bernaung di PPP karena kebijakan Orde Baru mengharuskan penyederhanaan sepuluh partai politik yang berkontestasi pada Pemilu 1973, menjadi hanya tiga partai, yaitu PPP, Partai Golkar, dan PDIP. Selama kurun waktu 1971-1992, Munjidah Wahab menjadi DPRD di Kabupaten Jombang selama empat periode atau 20 tahun. Seiring dengan perkembangan era reformasi, warga *nahdliyin* paling banyak mengalihkan pilihan politiknya kepada PKB yang *notabene* dibentuk oleh NU. Tetapi Munjidah Wahab tetap memilih untuk bernaung dalam partai PPP. Alasannya karena PPP merupakan partai yang membesarkan karirnya. Selain itu, alasannya untuk tetap mendukung PPP karena dalam pandangannya hanya PPP yang memiliki AD/ART yang mencantumkan secara tegas *ahlusunnah waljamaah* dan PPP memiliki tujuan untuk menyebarkan kebaikan.

Terkait karakteristik Muslimat NU di Jombang mungkin sedikit banyak berbeda dengan kader Muslimat lainnya. Dalam hal ini, kader Muslimat NU di lingkungan Muslimat NU Kabupaten Jombang memiliki program pendidikan politik. Demikian pula di Fatayat NU Kabupaten Jombang, juga memiliki program pendidikan politik. Dalam penjelasan Munjidah Wahab, program pendidikan politik bertujuan agar kader Muslimat NU dan Fatayat tidak buta politik. Dalam jangka panjang, program pendidikan politik juga mendorong pengetahuan politik para kader untuk dapat meraih jabatan-jabatan strategis. Pemikiran demikian didasari oleh keyakinan bahwa tugas melaksanakan dakwah bagi umat Islam akan lebih mudah jika memegang jabatan strategis. Dalam kaitannya dengan hal itu, Munjidah Wahab mencontohkan ketika dirinya menjadi wakil bupati, maka ia menelurkan program fasilitasi bagi masyarakat yang melakukan *i'tikaf* di masjid. Saat ini dirinya juga memiliki program untuk perayaan Tahun Baru Hijriyah. Demikian pula, programnya untuk mengatur jam belajar siswa sekolah. Nilai-nilai dakwah senantiasa menjadi landasan baginya dalam mengambil setiap tindakan dan kebijakan.

Sebaliknya, kader-kader Muslimat NU memiliki peran besar untuk menyukseskan program Munjidah Wahab di pemerintahan. Dalam hal ini, kader-kader Muslimat NU Jombang mengambil peran penting untuk menyukseskan program-programnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, banyak melibatkan dan didukung kader-kader Muslimat. Oleh karena itu tidak mengherankan bila dalam penjelasan Munjidah Wahab, kader Muslimat NU di Jombang dapat memahami kepentingan pilkada, sehingga paham kapan harus mengedepankan kesatuan umat, sehingga mereka memilih

untuk memenangkan kader Muslimat NU. Dalam memilih partai politik, kader Muslimat juga dibebaskan memilih partai politik tertentu. Atribut partai politik tertentu tidak diperkenankan dalam lingkungan Muslimat NU. Walaupun demikian, paling banyak pilihan partai politik kader Muslimat NU, adalah PKB dan PPP. Dapat dikatakan, kegiatan-kegiatan Muslimat NU lebih variatif, sehingga kader-kader Muslimat juga lebih antusias mengikuti program.

Dalam strategi menghadapi Pilkada Jombang Tahun 2018, Munjidah Wahab mengakui bahwa dana yang ia kucurkan, diniatkannya sebagai *shodaqoh* sehingga harus diikhlaskan. Dirinya mengakui bahwa untuk memenangkan pilkada, sulit jika tidak mengunakan dana dalam jumlah tertentu. Dalam proses mengikuti pilkada, kader-kader Muslimat diakuinya sangat membantunya dalam kampanye dan rela berkorban untuk mendukung kemenangan Munjidah Wahab dalam pilkada. Sebelumnya, ketika menjadi anggota DPRD, dirinya secara aktif mengikutsertakan Muslimat NU dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dukungan yang diberikan oleh kader Muslimat misalnya membiayai sendiri keikutsertaan mereka dalam kampanye di desa-desa. Oleh karena itu ketika dirinya terpilih kembali menjadi anggota DPRD maka ia juga memberikan kontribusi kepada Muslimat NU di Jombang. Dengan demikian, proses pertukaran tersebut dapat menjadi modal sosial yang luar biasa untuk memenangkan Pilkada Jombang Tahun 2018.

Dalam pengembangan kader di Muslimat NU dan Fatayat NU di Jombang, dapat dikatakan kedua organisasi tersebut saling bersinergi atau saling mendukung. Dalam hal ini, kader Fatayat yang sudah memasuki usia 45 tahun kemudian masuk ke Muslimat. Oleh karena itu kaderisasi kedua organisasi tersebut terus berjalan. Pimpinan Muslimat menempatkan kader dari Fatayat untuk menempati bidang-bidang yang sesuai di Muslimat. Seperti halnya cabang-cabang Muslimat NU lainnya, anggota Muslimat membayar iuran untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Hal tersebut juga sudah tertera dalam AD/ART bahwa setiap bulan semua anggota wajib untuk membayar iuran dalam jumlah tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Muslimat NU Kabupaten Jombang memiliki prestasi dalam mengumpulkan iuran dan mengembangkan pendanaan. Dalam pengelolaan dana, Muslimat NU Jombang bekerja sama dengan Bank Jatim. Dana yang telah terkumpul dalam setiap bulannya kemudian disetorkan ke Bank Jatim, hingga saat ini sudah terkumpul 500 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan mendanai kegiatan Muslimat NU, dan juga untuk memberikan sumbangan pada kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan. Dalam konteks ini, Muslimat NU adalah gambaran organisasi sosial keagamaan yang mampu hidup mandiri dengan dana yang bersumber dari iuran-iuran

anggota, tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain, bahkan dalam banyak hal mampu memberikan bantuan kepada kegiatan lain yang bermanfaat.

4.3 Keikutsertaan Laily Manshur dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Banyumas

Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2008 diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Mardjoko dan Ahmad Husein yang diusung oleh PKB; Singgih Wiranto dan Laily Manshur yang dicalonkan oleh Partai Golkar dan PAN; Bambang Priyono dan Tossy Ariyanto yang diusung oleh PKS, PPP, dan Partai Demokrat; serta Aris Wahyudi dan Asroru Maula yang dicalonkan oleh PDIP. Hasil pilkada menunjukkan pasangan Mardjoko dan Ahmad Hussein memenangkan pilkada dengan memperoleh suara 36,28 persen; Bambang Priyono dan Tossy Ariyanto mendapat suara 28,29 persen; Singgih Wiranto dan Laily Manshur memperoleh 23,8 persen; serta Aris Wahyudi dan Asroru Maula mendapatkan 10,91 persen. Terkait dengan fokus buku ini, maka uraian berikut ini dikhususkan mengenai keikutsertaan Laily Manshur dalam pilkada tersebut.

Laily Manshur adalah Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas. Ketika mengikuti Pilkada Banyumas Tahun 2008, dirinya sedang menjadi ketua Muslimat NU Banyumas ketiga kalinya. Oleh karena itu, perolehan suara pasangan Singgih Wiranto dan Laily Manshur sebanyak 23,8 persen merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Apalagi keduanya juga hanya menempati posisi ketiga. Padahal Singgih Wiranto saat itu adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas aktif, yang kemudian mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilkada Banyumas tahun 2008. Saat itu, keduanya mengusung jargon yang bertajuk "*rama biyunge wong Banyumas*", yang berarti mengidentikkan diri sebagai "bapak dan ibu masyarakat Banyumas", meskipun materi kampanye yang diusung kurang menyentuh persoalan keluarga dan kualitas hidup perempuan secara langsung. [73] Artinya kombinasi antara mantan sekretaris daerah dengan ketua Mulismat NU Banyumas tiga periode dalam hitungan di atas kertas dapat mengunpulkan suara yang lebih maksimal.

Walaupun demikian, pertarungan dalam pilkada seringkali menjadi suatu proses politik yang pelik. Dalam penjelasan Laily Manshur, salah satu faktor penyebab kekalahannya dalam pilkada tidak lepas dari sosok pasangannya (calon bupati). Ketika itu, Singgih Wiranto

[73] Sofa Marwah, "Menggagas Isu Kebutuhan Lokal Perempuan sebagai Materi Kampanye Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013", makalah dipresentasikan *pada Seminar Nasional Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed tanggal 26 September 2012.

mendapatkan serangan kampanye yang menyudutkannya karena senantiasa dikaitkan dengan kehidupan pribadinya. Situasi ini takpelak memengaruhi capaian suara pasangan Singgih Wiranto dan Laily Manshur dalam pilkada tersebut. Tajuk kampanye "*rama biyunge wong Banyumas*" terbukti tidak cukup ampuh untuk mendongkrak perolehan suara tersebut.

Pengalaman Laily Manshur dalam mengikuti kontestasi pilkada langsung mungkin tidak semulus para kader Muslimat NU lainnya sebagaimana sudah diuraikan di atas. Walaupun demikian, banyak hal menarik terkait keikutsertaannya dalam pilkada tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan, Laily Manshur mengakui bahwa dalam keikutsertaannya pada kontestasi Pilkada Banyumas 2008, ia tidak melakukan tindakan kampanye untuk kemenangan dirinya beserta pasangannya secara *all-out*. Ketika itu, proses berjalan apa adanya, dan dirinya yang memiliki latar belakang guru, tidak berlaku sebagaimana seorang aktor politik yang ingin mencapai kemenangan dalam pilkada, sehingga tidak totalitas dalam meraih kemenangan. [74]

Gambar 6. Wawancara dengan Ketua PC Muslimat NU Banyumas

Selain itu, keberadaan Laily Manshur sebagai ketua Muslimat NU tiga periode justru dimanfaatkan oleh lawan-lawannya untuk membuat isu yang terlihat rasional tetapi dapat yang mematikan potensi

[74] Subbab ini bersumber dari wawancara dengan Laily Manshur, ketua Cabang Muslimat NU Banyumas, pada tanggal 26 Juni 2019.

kemenangannya. Ketika hawa panas pilkada mulai bergulir, beredar isu bahwa seandainya Laily Manshur berhasil menjadi wakil bupati bersama Singgih Wiranto sebagai bupati, maka hal tersebut justru menjadikannya tidak dapat mengurusi Muslimat NU secara baik. Kesibukannya sebagai wakil bupati akan menjadikan Muslimat NU terbengkalai. Hal tersebut diakui oleh Laily Manshur betul-betul telah berhasil menjadikan kader Muslimat NU sendiri tidak banyak yang memberikan suaranya pada saat pilkada digelar. Hal itu disebabkan mereka berpikir nanti siapa yang akan mengurusi Muslimat NU jika ketua mereka terpilih sebagai wakil bupati. Sebuah permainan politik yang betul-betul dapat menjatuhkan elektabilitas seorang ketua Muslimat NU dalam politik lokal. Selain itu, diakui oleh Laily Manshur, bahwa dukungan dari para kyai terhadap dirinya dalam Pilkada Banyumas 2008 juga tidak utuh, tetapi terpecah, sehingga hal tersebut juga memengaruhi pilihan politik para kader Muslimat.

Lebih lanjut, keikutsertaan Laily Manshur sebagai calon wakil bupati bersama dengan Singgih Wiranto tidak didukung oleh partai yang notabene dilahirkan oleh NU, yaitu PKB. Ketika itu, PKB mengusung Mardjoko dan Ahmad Husein. Mardjoko dan Ahmad Husein sama-sama tidak memiliki latar belakang sebagai kader PKB, tetapi dalam perhelatan pilkada tersebut justru diusung oleh PKB. Adapun Laily Manshur yang merupakan ketua Muslimat NU dengan latar belakang sebagai pegawai negeri sipil (guru), beserta Singgih Wiranto yang merupakan mantan sekretaris daerah, keduanya diusung oleh Partai Golkar. Dalam hal ini Laily Manshur memang merupakan simpatisan Partai Golkar terkait latar belakangnya sebagai guru PNS.

Bagi masyarakat *nahdliyin*, situasi demikian juga dapat berkembang menjadi polemik. Apalagi dalam pertarungan politik, hal tersebut dapat dihembuskan menjadi *blackcampaign* yang mematikan juga. Keberadaan PKB yang notabene dilahirkan oleh NU, menjadikan "arahan" untuk memilih pasangan yang didukung oleh PKB menjadi "bersifat alamiah" sebagai sesuatu yang seharusnya, karena ikatan sebagai warga *nahdliyin*. Adapun keberadaan Laily Manshur yang berpasangan dengan Singgih Wiranto, meskipun dirinya merupakan ketua cabang Muslimat NU Banyumas, karena tidak diusung oleh PKB, maka seolah-olah menjadi tidak cukup pantas untuk didukung dan dimenangkan oleh warga *nahdliyin*, bahkan oleh kader Muslimat NU sendiri. Sebuah hal yang sangat ironis dalam praktik politik lokal.

AD ART Muslimat menegaskan keberadaan Muslimat NU sebagai ormas keagamaan yang netral terhadap semua partai. Kader-kader dalam Muslimat sepertinya halnya kader Muslimat NU di Banyumas juga tidak secara kelembagaan mendukung partai tertentu, PKB misalnya. Tetapi dalam praktiknya, mereka lebih banyak yang

mendukung PKB dan kandidat yang didukung juga lebih banyak karena ikatan sebagai warga *nahdliyin* yang terorganisasi dalam NU. Terkait dengan hal itu, Laily Manshur menegaskan dirinya ingin berlaku dan patuh pada AD ART, yaitu tidak mengkondisikan Muslimat NU secara pribadi untuk mendukung dirinya agar terpilih menjadi wakil bupati. Dirinya menginginkan tetap berlaku sesuai yang tertera dalam AD ART, oleh karena itu, keikutsertaannya dalam pilkada tidak membawa gerbong organisasi. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa tim suksesnya yang meminta dukungan kepada kader Muslimat di bawah terkait keikutsertaan dirinya dalam pilkada. Laily Manshur juga menegaskan bahwa seandainya ada kandidat tertentu yang akan mengikuti kontestasi politik meminta dukungannya, maka dirinya akan memberikan dukungannya secara pribadi tidak membawa Muslimat NU sebagai organisasi.

Di sisi lain, situasi tersebut juga ironis mengingat sebagai ketua pengurus cabang Muslimat tiga kali, loyalitas yang diberikan para kader Muslimat tidak tercermin sebagaimana dalam tubuh organisasi Muslimat. Secara internal, mereka adalah kader yang memiliki kepatuhan, loyal, dan taat kepada pemimpinnya. Antara lain hal tersebut terlihat dari kepemimpinan para ketua Muslimat yang dapat berlangsung dari periode ke periode dan berjalannya kegiatan keormasan sesuai imbauan ketua Muslimat di level masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Walaupun demikian, ketaatan tersebut tidak berlaku dalam kontek politik. Pilihan politik kader Muslimat dapat tersebar sesuai dengan situasi politik yang berlangsung dan arahan tokoh-tokoh tertentu. Ikatan kuat terhadap organisasi Muslimat sebagai organisasi yang dicintai dan dibesarkan oleh masing-masing kadernya, juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap pilihan politik ketika ketua Muslimat level cabang mengikuti pilkada, sehingga tidak banyak dipilih oleh kadernya sendiri. Artinya, dalam kontestasi politik, kondisinya tidak akan sama. Panggung politik memungkinkan tokoh-tokoh tradisional dalam kultur *nahdliyin* juga tidak satu suara mendukung kandidat tertentu, sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi pilihan politik kaum *nahdliyin* pada umumnya. Walaupun dalam AD ART organisasi NU dan Muslimat NU, organisasi tersebut netral dalam politik.

Sebagai representasi tokoh Muslimat, Laily Manshur hanya menegaskan bahwa ketidakberhasilannya meraih kursi wakil bupati ketika itu karena dirinya sudah digariskan untuk tidak menjadi wakil bupati. Artinya, takdir menjadi penyebab utama dalam penjelasannya. Hal tersebut mencerminkan bentuk-bentuk kepasrahan dan keikhlasan seorang kader Muslimat dalam menjalankan dan menghadapi situasi kehidupan sehari-hari, sebagaimana juga tercermin dari keikhlasan mereka dalam mengurus Muslimat. Mereka tidak pernah menerima gaji

bahkan lebih sering memberikan sumbangan dalam aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan.

Dalam pandangan Laily Manshur, kader Muslimat yang beranggotakan perempuan *nahdliyin* berumur 45 tahun atau sudah menikah sesungguhnya banyak yang bagus dan memiliki potensi untuk didorong masuk dalam kontestasi politik. Walaupun demikian, hingga sekarang masih sedikit dari mereka yang berminat ikut aktif dalam politik, yang disebabkan sumber daya ekonomi yang kurang dan pemahamaan mereka sebagai sumber daya politik belum cukup mendukung untuk memasuki kehidupan politik praktis. Dalam proses aktivitas keseharian dalam organisasi Muslimat, juga tidak ada pengarahan ataupun pelatihan tertentu yang mendukung potensi mereka seandainya ikut tertarik masuk dalam politik. Situasi ini sesungguhnya juga menegaskan bahwa Muslimat NU adalah organisasi perempuan yang memiliki jati diri sebagai sebagai organisasi sosial keagamaan yang dipenuhi dengan dasar keikhlasan untuk bermanfaat bagi sesama dan agamanya. Menjadi kader politik adalah bagian dari proses lebih lanjut dari pengalaman-pengalaman mereka mengelola dan mengembangkan organisasi. Oleh karena itu menjadi kader politik sesungguhnya adalah keniscayaan yang menyertai perjalanan mereka di organisasi dan menjadi kader politik yang unggul juga bukan merupakan hal yang mustahil bagi mereka.

BAB 5
PENUTUP

Keberadaan organisasi perempuan Islam, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi perempuan memang memiliki kapasitas yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Keberadaan mereka sebagai *civil society* memang menunjukkan sosok kekuatan kelompok perempuan. Mereka memiliki jumlah pendukung dan simpatisan yang sangat banyak, dari pusat sampai ke pelosok desa. Keanggotaan mereka terdiri dari perempuan *nahdliyin* di seluruh Indonesia dan memiliki hierarki kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Sebagai warga *nahdliyin*, mereka cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi kepada kiai, nyai, dan pimpinan organisasi mereka. Mereka banyak bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan, dan kesehatan. Muslimat NU mengelola lembaga pendidikan tingkat serta mengelola panti asuhan untuk yatim piatu dan lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Di bidang kesehatan, mereka juga mengelola klinik rumah bersalin ataupun rumah sakit. Muslimat NU juga mengembangkan koperasi dan usaha keterampilan produktif lainnya yang dikelola secara mandiri oleh para anggotanya.

Selain memiliki komitmen dalam menangani bidang sosial ekonomi dan keagamaan, Muslimat NU juga memiliki potensi besar untuk mendukung keberhasilan pembangunan gender di daerah. Hal ini mengingat bahwa isu-isu gender di tingkat daerah membutuhkan komitmen aparat dan seperangkat elemen untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan suatu daerah sudah mengintegrasikan isu gender. Implementasi kebijakan pembangunan berperspektif gender membutuhkan dukungan semua unsur masyarakat. Sebagai sebagai salah satu organisasi perempuan berbasis keagamaan yang memiliki kekuatan sosial politik yang besar, Muslimat NU memiliki potensi untuk mendukung berperspektif gender di daerah, dengan dukungan sumber daya yang mereka miliki serta komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan dan keluarganya. Dukungan keanggotaan yang sangat banyak dan mendalam, menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU untuk mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender sekaligus menjadi *gender vocal point* di masyarakat.

Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan politik di negara ini, persentuhan Muslimat NU dengan dunia politik sangat sulit dihindarkan. Terutama dalam level individu atau kader. Bahkan sesungguhnya, Muslimat NU sebagai organisasi perempuan yang menyatukan perempuan *nahdliyin* di Indonesia, mereka dapat melahirkan kader-kader politik yang handal. Situasi demikian terjadi sepanjang mereka mengambil posisi berjarak dengan kekuasaan. Persentuhan dengan dunia politik lebih menguat ketika reformasi bergulir. Sejak saat itu hingga sekarang, reformasi yang telah mengembalikan naluri alamiah warga *nahdliyin* untuk ikut serta dalam perhelatan politik. Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjadi partai politik pilihan utama warga *nahdliyin* sejak momentum politik membuka ruang yang luas bagi pembentukan partai.

Dalam catatan sejarah gerakan organisasi perempuan di Indonesia, mungkin berdirinya Muslimat NU boleh dibilang "agak terlambat" yaitu tahun 1946. Hal tersebut mengingat organisasi perempuan di Indonesia pertama sudah berdiri sejak tahun 1915, yaitu dengan berdirinya Pawiyatan Wanito. Inisiasi-iniasi untuk memperjuangkan berdirinya Muslimat NU sudah lebih dahulu terbentuk yaitu sekitar tahun 1938 dengan keikutsertaan perempuan muslimah dalam Muktamar NU ke-13 di Menes Banten. Meskipun berdirinya boleh dibilang "agak terlambat" dibanding organisasi-organisasi perempuan lainnya di Indonesia, satu hal yang harus dicatat bahwa tumbuh berkembangnya Muslimat NU sebagai organisasi perempuan justru tetap bertahan hingga sekarang dan menjadi salah satu anggota organisasi perempuan yang memiliki anggota terbanyak hingga saat ini.

Perkembangan organisasi Muslimat NU, secara nyata telah banyak melahirkan tokoh-tokoh politik perempuan yang luar biasa. Persentuhan dengan dunia politik yang pertama adalah menjelang dilaksanakannya Pemilu 1955. Ketika itu NU masih menjadi partai politik dan menjadi salah satu peserta Pemilu 1955. Pada masa tersebut ketua Muslimat NU adalah Nyai Mahmudah Mawardi yang secara aktif berkampanye untuk Partai NU menjelang Pemilu 1955. Nyai Mahmudah Mawardi menjadi ketua Muslimat NU pada periode 1950-1979. Selanjutnya ketua Muslimat NU adalah Nyai Asmah Syahruni yang memimpin Muslimat NU pada periode 1979-1995. Nyai Asmah Syahruni juga menjadi anggota DPR RI. Ketua Muslimat NU selanjutnya adalah Nyai Aisyah Hamid Baidlowi yang menjadi ketua Muslimat NU pada periode 1995-2000. Nyai Aisyah Hamid juga menjadi anggota DPR RI untuk tiga periode pemilu yaitu sejak 1997 hingga 2009. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, Muslimat NU diketuai Hj. Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Hj. Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, Hj. Khofifah Indar Parawansa pernah menjabat

sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI pada 1999-2001 dan Menteri Sosial RI pada 2014-2018.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa meskipun Muslimat NU merupakan organisasi perempuan yang mengambil posisi pada kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan, tetapi kedekatan dengan politik tidak bisa dihindari. Secara keorganisasian, Muslimat NU juga tetap merupakan organisasi perempuan *nahdliyin* yang bergerak di bidang sosial, ekonomi dan keagamaan. Tetapi pada saat yang sama mereka cukup banyak menghasilkan kader-kader politik yang handal. Kita juga bisa melihat adanya dinamika hubungan organisasi perempuan tersebut dengan perkembangan politik yang terjadi, terutama setelah era reformasi di negeri ini. Ikatan sebagai sebuah organisasi besar dengan keanggotaan yang banyak tersebar dari perkotaan hingga perdesaan menjadikan banyak aktivis Muslimat bersinggungan dengan kegiatan politik. Hal itu tercermin dengan keikutsertaan para aktivis Muslimat NU dalam perhelatan besar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun pemilihan anggota legislatif pusat hingga kabupaten.

Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), semakin banyak aktivis Muslimat NU yang tampil dan berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Dalam waktu bersamaan dengan terpilihnya Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur melalui Pilkada serentak tahun 2018, Munjidah Wahab terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023 dalam Pilkada 2018. Munjidah Wahab adalah Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Jombang. Demikian pula Umi Azizah, yang terpilih sebagai Bupati Tegal dalam Pilkada 2018. Umi Azizah adalah ketua PC Muslimat NU Tegal. Deskripsi mengenai sepak terjang Munjidah Wahab dan Umi Azizah telah dijabarkan secara lengkap pada bab sebelumnya. Seperti halnya perhelatan pilkada pada umumnya, kandidasi yang diikuti oleh tokoh perempuan Muslimat NU juga ada yang mengalami kegagalan. Terkait dengan hal itu, bab sebelumnya juga telah menyajikan kegagalan Laily Manshur sebagai calon wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Banyumas.

Pada akhirnya tulisan ini menekankan bahwa Muslimat NU merupakan organisasi perempuan berbasis keagaman Islam yang senantiasa memiliki komitmen mengembangkan kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan. Mereka telah mengalami berbagai dinamika dengan dunia politik, dari dekade-dekade awal pendirian hingga saat ini. Sebagai organisasi dengan dukungan perempuan *nahdliyin* seluruh Indonesia, mereka sesungguhnya merupakan kekuatan yang nyata untuk mendukung pembangunan gender di Indonesia. Demikian pula mereka juga memiliki potensi untuk aktif dalam dunia politik. Tetapi hingga saat ini, mereka masih bertahan sebagai *civil society* yang secara konsisten

mengembangkan misi sosial ekonomi dan keagamaan. Walaupun demikian, himpitan dengan dunia politik tidak bisa dihindari. Bahkan dalam sepanjang perkembangannya hingga sekarang, banyak kader-kader perempuan Muslimat NU yang memegang peran penting dalam praktik politik di Indonesia, dari pusat hingga daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Alagappa, Muthiah, 2004. *Civil Society and Political Change in Asia*. Stanford California: California University Press.

Edwards, Micheal, 2004. *Civil Society*. Cambridge: Polity Press.

Feith, Herbert, 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

Gardono, Iwan, 2006. "Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat", dalam Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society dalam Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.

Gaus, Gerad F dan Kukantas, Chandran, 2016. "Gerakan-Gerakan Sosial Baru", dalam *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media dan LIPI.

Harrison, Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Indiah Rahayu, Ruth, 2004. "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan", dalam Lisa Hadiz (ed.), *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2004.

Isnaeniyah, Erni, 2017. "Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi NU", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* Vol 2 1 Maret, h. 154-168.

Karim, A Gaffar, 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 1995.

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2019. *Pembangunan Berbasis Gender 2019*. Jakarta.

Lestari, Soetji, Marwah, Sofa, Pratiwi, Oktafiani Catur, 2017-2018. *Model Hilirisasi Model Hilirisasi Kontribusi Kelompok Perempuan Muslimat NU terhadap Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah*, Laporan Penelitian PSHP Kemenristekdikti.

Marc, Hooghe, 2013. "Gerakan Sosial", dalam Ishiyama, John dan Breuning, Marijke (ed.), *Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*. Jakarta: Kencana.

Marijan, Kacung, 1992. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Marwah, Sofa, 2012. "Menggagas Isu Kebutuhan Lokal Perempuan sebagai Materi Kampanye Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013", makalah dipresentasikan *pada Seminar Nasional Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed tanggal 26 September.

Miles, Matthew B dan Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

PP Muslimat NU, 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PP Muslimat NU.

Pilcher, Jane dan Whelehan, Imelda, 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*. London: Sage Publication.

Punch, Keith, 2006. *Developing Effective Research Proposal*. London: Sage Publication.

Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan (Makalah Kebijakan), 2010. Jakarta: UNDP Indonesia.

Rahardjo, Dawam, 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta : LP3ES.

Rai, Shirin, M. 2002. *Gender and the Political Economy of Development*. Cambridge: Polity Press.

Ratih, Gusti Agung Ayu, "Jejak-jejak Perbincangan Perempuan dalam Sejarah", *Jurnal Perempuan* No. 63, h. 11-24.

Sekelumit *Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU*, 30 Maret 2015, dalam http://www.nu.or.id/post/read/58517/sekelumit-profil-sejarah-dan-prestasi-muslimat-nu diakses tanggal 1 Juni 2019.

Shiraishi, Takashi, 1997. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti.

Sitompul, Martahan, 1989. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sjarifudin, Nia. "Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan", *Jurnal Perempuan* No. 63, h. 29-39.

Strauss, Anslem dan Corbin, Juliet, 1990. *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedur and Techniques*. Beverly Hills, SA: Sage Publications.

Sullivan, Barbara, 1998. "Carole Pateman: Participatory Democracy and Feminism", dalam April Carter dan Geoffrey Stokes, *Liberal Democracy and Its Critics*. Cambridge: Polity Press.

Trisnawati, Diana, 2019. *Kiprah Masyumi Muslimat dalam Pergerakan Wanita Indonesia Periode 1945-1960*, Skripsi Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga.

Triwibowo, Darmawan, 2006. "Menakar Signifikansi Aktivisme Civil Society", dalam Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.

Van Bruinessen, Martin, 1994. NU, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.

Vreede-De Stuers, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.

White, Stephen K, 2002. *"Skeptics at The Celebration: Civil Society and Early Frankfurt School",* dalam Nancy L Rosenblum dan Robert C Post (ed.), *Civil Society and Government*. Princeton: Princenton University Press.

Wieringa, Saskia E, 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan : Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta : Galangpress.

Zalman, Ryan, 2013. "Masyarakat Sipil", dalam Ishiyama, John dan Breuning, Marijke (ed.), *Ilmu Politik dalam Paradigma dalam Abad-21*. Jakarta: Kencana.

Sumber internet dan lainnya:

https: //aisyiah.or.id diakses 5 Agustus 2020.

http://kpu-jombangkab.go.id diakses tanggal 23 Oktober 2019

https://kab-tegal.kpu.go.id diakses tanggal 20 September 2019

http://muslimatnu.or.id/tokoh/aisyah-hamid-baidlowi-muslimat-nu-dan-pemberdayaan-ekonomi-perempuan/ diakses tanggal 3 April 2020

http://muslimatnu.or.id/tokoh/asmah-syahruni-dari-rantau-muslimat-nu-penembus-batas/ diakses 3 April 2020

http://muslimatnu.or.id/tokoh/mahmudah-mawardi-dan-sepak-terjang-politikus-perempuan-di-pemilu-1955/ diakses tanggal 3 April 2020.

http://muslimatnu.or.id/tokoh/nyai-djuaesih-tokoh-muslimat-nu-jawa-barat/ diakses tanggal 3 April 2020

http://muslimatnu.or.id/tokoh/nyai-hindun-peletak-dasar-dasar-muslimat/ diakses tanggal 3 April 2020

https: //*muslimat-nu.or.id* diakses 5 Agustus 2020.

https://pkb.id diakses tanggal 8 Juni 2019.

http://republika.co.id 12 Agustus 2017 diakses 4 April 2020

Wawancara dengan Laily Manshur, ketua Cabang Muslimat NU Banyumas, pada tanggal 26 Juni 2019.

Wawancara dengan Munjidah Wahab, Bupati Jombang/Ketua PC Muslimat NU Jombang, pada tanggal 9 November 2019.

Wawancara dengan Umi Azizah, Bupati Tegal/ Ketua PC Muslimat NU Tegal pada tanggal 1 Agustus 2019.

نهضة علماء
N U

TENTANG PENULIS

Dr. Sofa Marwah, S.IP., M.Si. lahir di Kediri, 26 April 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan S2 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga, serta S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ia adalah staf pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed. Publikasi artikelnya pada jurnal internasional terindeks Scopus yaitu "Political Representation for Javanese Women in The Afirmation Policy in Indonesia" dalam Asia-Pasific Social Science Review, Dela Salle University, Philippines, serta "Women of the South Coast of Java in Politics and Rural Development", dalam Journal of International Women's Studies, Bridgewater State University, USA. Buku yang ditulis yaitu Kontestasi Perempuan dan Politik dalam Budaya Banyumas, Perempuan dalam Tradisi Kekuasaan Islam, Pemikiran Politik Indonesia, serta Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Jawa Pinggiran. Ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Ketua Program Studi Berprestasi I Unsoed Tahun 2014 dan Dosen Berprestasi I Bidang Sosial Humaniora Unsoed Tahun 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Pusat Penelitian Gender, Anak, dan Pelayanan (PPGAPM) LPPM Unsoed

---

Dr. Soetji Lestari, M.Si., lahir di kota Ngawi Jawa Timur pada 23 Mei 1962. Pendidikan S1 mengambil jurusan Sosiologi FISIPOL UGM (1981 – 1986), Pendidikan S2 mengambil Program Studi Studi Kependudukan Jurusan Antar Bidang Fakultas Pascasarjana UGM (1991-1994), sedang pendidikan S3 ditempuh di Institut Pertanian Bogor dengan mengambil jurusan Sosiologi Pedesaan Angkatan 46 (2009 – 2014). Saat ini yang bersangkutan adalah pengajar tetap pada Prodi S2 Sosiologi Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed. Yang bersangkutan tertarik pada isu-isu seputar gender dan kependudukan serta media sosial. Beberapa kali mengikuti call paper yang diselenggarakan oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) maupun yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP., M.A. lahir di Tegal, 27 Oktober 1979. Menamatkan pendidikan S1 nya dari Prodi Ilmu Pemerintahan UGM dan S2 Prodi Ilmu Politik di universitas yang sama. Saat ini penulis menjadi staff pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed sejak tahun 2005. Penulis tertarik pada kajian governance, politik lingkungan, dan politik perkotaan. Beberapa tulisannya telah dimuat dalam jurnal dan buku bunga rampai antara lain: strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah (Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2014), The Politics of The Environment: Power Contestatition over Ecological Space in Purbalingga (International Journal of Management Science and Business Administration, 2016), Mengelola Pelayanan Publik di Daerah Perbatasan (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017), Menjaga Kualitas Pemilu yang Demokratis (Jurnal Bawaslu, 2017), Knowledge and Practice in Household Waste Management (National Public Health Journal, 2019) dan The Search For A Common Livelihood Space Between Rural and Industrial Areas (Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2020).

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Gd. UNSOED *Press*
Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin 708 Purwokerto
Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 626070
Email: unsoedpress@unsoed.ac.id

ISBN 978-623-7144-89-2